BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini salah satunya dicapai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah secara bertahap dan terencana.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra PD). Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Tujuan dan Sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana yang tindakan dan kegiatan mendasar dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Binjai saat ini telah memiliki Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029. Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai adalah pelaksana pemerintahan unsur urusan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi yang kewenangan daerah di bidang perhubungan, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota (RPJMD) 2025-2029.

Renstra merupakan komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan Kota Binjai serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah kota Binjai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
 Berkelanjutan;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
- 17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
- Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
- 19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029
- 21. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam memberikan tanggung jawab yang sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama pegawai Dinas Koperasi dan UKM yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Binjai 2025-2029
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Binjai secara berkesinambungan pada urusan koperasi dan UKM
- c. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolak ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.

- b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika rencana straetgis perangkat daerah tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

- 1. Latar belakang;
- 2. Dasar hukum penyusunan;
- 3. Maksud dan tujuan;
- 4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Dinas Koperasi dan UKM, kelompok sasaran layanannya adalah unit kerja).
- 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- 1. Tujuan Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
- 2. Sasaran Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
- 3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 1. Uraian program
- 2. Uraian kegiatan
- 3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaanpengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b) pelaksanaan Kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) pemberian dukungan dan melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i) pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan
 Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dinas;
- i. melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumah-tanggaan dinas;
- j. mengelola pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan
 Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- e. mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dinas;
- melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumah-tanggaan dinas;
- j. mengelola pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Koperasi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melaksanakan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran, kebijakan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan, akreditasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, bimbingan terhadap usaha koperasi pertanian dan koperasi non pertanian;
- c. melaksanakan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran dan kebijakan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha kelompok, usaha ekonomi produktif (KUEP) yang ada di masyarakat;
- d. menyusun program kerja; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas fungsinya.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kepada usaha mikro kecil dan menengah di bidang industri pertanian;
- c. melaksanakan penyiapan dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kepada usaha mikro kecil dan menengah di bidang industri non pertanian dan kerajinan;
- d. melaksanakan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai sumber-sumber daya yang ada dapat disajikan pada tabeltabel di bawah ini:

a. Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

Tabel 2.1

Jumlah Pejabat dan Pelaksana

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Pratama	
2	Pejabat Administrator	
3	Pejabat Pengawas	
4	Pejabat Fungsional	
5	Ketua Tim Kerja	
6	Pelaksana	
7	Pegawai Pemerintah dengan PK	
	Total Pegawai	

Data per April 2025

Tabel 2.2

Jumlah Keseluruhan SDM

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
2	Pegawai Pemerintah dengan PK	
3	Tenaga Kontrak	
	Total Pegawai	

Data per April 2025

Tabel 2.3

Jenjang Pendidikan SDM Perangkat Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 (Doktoral)	
2	Strata 2 (Magister)	
3	Strata 1 (Sarjana)	
4	Ahli Madya 3	
5	SMA	
6	SMP	
7	SD	
	Total	

Tabel 2.4
Pegawai yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian Diklat	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	0
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	0
	Total	0

Tabel 2.5

Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	
2	Eselon III	
3	Eselon IV	
4	JF Perencana	
5	JF Analis Bencana	
6	JF Analis Kebakaran	
7	JF	
8	Pelaksana	

Keadaan Sumber Daya Pendukung di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

Sebagai pendukung dalam kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6

Keadaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Lahan Kantor	
2	Luas parkiran kantor	
3	Jumlah Gedung atau Bangunan	
4	Jumlah Ruang Kerja	
5	Jumlah Ruang Rapat	
6	Jumlah Aula	

7	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	
8	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	
9	Jumlah toilet	
10	Jumlah Genset	

2.1.3.Kinerja Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

Adapun kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dapat dilihat dari perbandingan antara rencana dengan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021-2026. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran yang telah terealisasi.

Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya		get Ren ngkat Da Tahun	aerah			Rasio Capaian pada Tahun			
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Indikator Kinerja Utama													
1	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB (ADHB)	Angka	-	-	-	11,4	11,6	11,8						
В	Indikator Kinerja Kunci		-	-	-									
1.1	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	-	-	-	3	5	5						
1.2	Persentase KSP/USP aktif	%	-	=	-	44	48	52						
1.3	Persentase pengelolaan UMKM	%	-	-	-	3	5	5						

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha.
- b. Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Koperasi, khususnya koperasi sektor real
- c. Masih kurangnya jumlah KSP/USP yang berpredikat "Sehat".
- d. Masih rendahnya omzet koperasi
- e. Masih rendahnya Pemahaman SDM Koperasi tentang prinsip dan nilai koperasi dalam pengelolaan koperasi
- f. Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil
- g. Masih rendahnya usaha kecil yang berkembang
- h. Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan dan jumlah umkm yang berbadan usaha.
- i. Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas.
- j. Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis pemberdayaan Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Menengah merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 tahun kedepan (tahun 2025-2029) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2021-2026 dan perlu penyelesaian secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan sebelumnya, maka diperoleh 1 (satu) isu-isu strategis yang ada di bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian visi misi gubernur khusus pada misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM

Dari isu tersebut di atas, maka upaya yang akan dilakukan agar koperasi berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan volume usaha/omset koperasi lebih meningkat jumlahnya melalui program kegiatan yang menunjang sehingga koperasi-koperasi dapat berhasil guna dan berdaya guna, dikelola oleh anggota dan masyarakat secara optimal sesuai aturan-aturan perkoperasian sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi kesejahteraan dan masyarakat khususnya anggota koperasi.

Sedangkan untuk UMKM program kegiatan diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau usaha kecil menengah naik kelasmelalui upaya

peningkatan Kualitas usaha kecil sehingga dapat mengurangi permasalahan ekonomi secara umum yaitu mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera.

2) Peningkatan produk **UMKM** mendapatkan yang pengakuan Hak Kekayaan Intelektual Peningkatan produk UMKM melalui pengakuan Hak Intelektual (HKI) Kekayaan dapat dicapai melalui peningkatan daya saing, perlindungan hukum kuat. dan peningkatan nilai ekonomi yang produk. Beberapa langkah strategis meliputi pendaftaran merek dagang, pendampingan teknis dan informasi HKI dari pemerintah atau lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan HKI.

Dalam undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa peranan merek sangat penting dalam era perdagangan global (UU RI No. 15, 2001). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf. angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dilihat dari definisi Merek, untuk menentukan suatu Merek tidaklah sulit, karena hanya berupa tanda yang memiliki daya pembeda. Merek merupakan aset tak berwujud yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip yang

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (UU RI No. 28, 2014).

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri (UU RI No. 31, 2000). Perlindungan terhadap Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, khususnya dalam hal karya seni.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

"BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN"

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
- 2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
- 3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan

berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan "Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan", maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2: Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4: Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Binjai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: "MENINGKATNYA KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN"

Sasaran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai adalah:

- 1) Meningkatnya omset usaha UMKM.
- 2) Meningkatnya potensi dan ekspansi koperasi

Penjabaran dari Tujuan dan Saaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN				BASELINE	TARGET TAHUN						
SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	SARAN INDIKATOR		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
- Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	0	10	11	12	14	17	20	
		Meningkatnya omset usaha UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)	0	6	8	10	12	14	16	
			Proporsi Jumlah UKM non Pertanian (%) (%)	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Angka)	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90	
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	
			Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang	0	1	2	3	5	7	9	

		memiliki HAKI (Pelaku Usaha)							
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34
	Meningkatnya potensi dan ekspansi koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (%)	0	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79

3.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra, dan merupakan langkah-langkah yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal.

Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Koperasi dan UKM di Kota Binjai telah dikemukakan di atas, ditempuh strategi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
- 2) Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
- 3) Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
- 4) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
- 5) Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
- 6) Menyelenggarakan dan mengikuti pameran

Pengembangan kebijakan dari strategi di atas antara lain:

- Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
- Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing, saat ini mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2025-2029.

Ringkasan dalam strategi dan kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut:

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bisnis bagi pelaku UMKM Mempermudah akses permodalan dan insentif bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
Memperluas akses pasar melalui ekonomi baru di seluruh kecamatan untuk meningkatkan daya sebar putaran ekonomi Mendorong kolaborasi koperasi, UMKM dan pemerintah dalam membangn ekosistem usaha berkelanjutan dan merata	Pencanangan polarisasi pasar dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dengan permodalan, pengembangan strategi pasar, dan pengelolaan badan usaha
Peningkatan akses pembiayaan untuk starup dan UMKM di sektor ekonomi kreatif	
Memperkuat promosi produk kreatif lokal melalui platform digital dan jaringan kemitraan nasional maupun internasional	Penguatan promosi melalui even daerah, provinsi, nasional dan bahkan internasional

Memfasilitasi kerja sama antara BUMD dan UMKM untuk memperluas rantai pasokan lokal dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar

Pengembangan studi kelayakan bisnis, pengelolaan aplikasi UMKM dan riset pengembangan pada produk lokal

Bagan di bawah ini akan menjelaskan keterkaitan seluruh komponen dari Tujuan, Sasaran, juga indikator outcome serta crosscutting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai pada Lampiran Renstra ini.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Binjai merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah). Untuk menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai pembangunan Kota Binjai, disusunlah program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program-Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(O1)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningka tnya akses dan kualitas layanan perlindun gan sosial	Meningka tnya kontribus i UMKM dalam perekono mian				Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	
		Meningkatnya omset usaha UMKM			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%) Proporsi Jumlah	
					UKM non Pertanian (%) (%)	
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Angka)	
					Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)	

[I1-1- D-1-1	
		Jumlah Pelaku	
		Usaha Ekonomi	
		Kreatif yang	
		memiliki HAKI	
		(Pelaku Usaha)	
		Proporsi Jumlah	
		Usaha Kecil dan	
		Menengah (UKM)	
		Non Pertanian	
		(%)	
Meningkatnya		Nilai AKIP	2.17.01 -
Pelayanan		Perangkat	PROGRAM
Administrasi		Daerah (Nilai)	PENUNJANG
Perkantoran		, ,	URUSAN
			PEMERINTAHAN
			DAERAH
			KABUPATEN/KO
			TA '
	Meningkatny	Jumlah Berita	2.17.01.2.01 -
	a	Acara Hasil	Perencanaan,
	Pelaksanaan	Forum Perangkat	Penganggaran,
	Penyusunan	Daerah	dan Evaluasi
	Perencanaan	Berdasarkan	Kinerja
	dan	Bidang Urusan	Perangkat
	Pendanaan	yang Diampu	Daerah
	Perangkat	dalam Rangka	
	Daerah	Penyusunan	
		Dokumen	
		Perencanaan	
		Perangkat	
		Daerah (Berita	
		Acara)	

		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

		Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

		Penyelenggaraan	Daerah
		Urusan	Baeran
		Pemerintahan	
		Daerah yang	
		Diampu Diampu	
		(Substansi)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen	
			1 - Penyusunan
		Perencanaan	Dokumen
		Perangkat	Perencanaan
		Daerah	Perangkat
		(Dokumen)	Daerah
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen RKA-	2 - Koordinasi
		SKPD dan	dan Penyusunan
		Laporan Hasil	Dokumen RKA-
		Koordinasi	SKPD
		Penyusunan	
		Dokumen RKA-	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen	3 - Koordinasi
		Perubahan RKA-	dan Penyusunan
		SKPD dan	Dokumen
		Laporan Hasil	Perubahan RKA-
		Koordinasi	SKPD
		Penyusunan	
		Dokumen	
		Perubahan RKA-	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen DPA-	4 - Koordinasi
		SKPD dan	dan Penyusunan
		Laporan Hasil	DPA-SKPD
		Koordinasi	
		Penyusunan	
		Dokumen DPA-	

		SKPD (Dokumen)	
		2111 2 (2 01101111011)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen	5 - Koordinasi
		Perubahan DPA-	dan Penyusunan
		SKPD dan	Perubahan DPA-
		Laporan Hasil	SKPD
		Koordinasi	
		Penyusunan	
		Dokumen	
		Perubahan DPA-	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.01.000
		Capaian Kinerja	6 - Koordinasi
		dan Ikhtisar	dan Penyusunan
		Realisasi Kinerja	Laporan Capaian
		SKPD dan	Kinerja dan
		Laporan Hasil	Ikhtisar Realisasi
		Koordinasi	Kinerja SKPD
		Penyusunan	
		Laporan Capaian	
		Kinerja dan	
		Ikhtisar Realisasi	
		Kinerja SKPD	
		(Laporan)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.01.000
		Evaluasi Kinerja	7 - Evaluasi
		Perangkat	Kinerja
		Daerah (Laporan)	Perangkat
		7 1 1	Daerah
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen Hasil	8 -
		Penyelenggaraan	Penyelenggaraan
		Walidata	Walidata
		Pendukung	Pendukung

		Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Statistik Sektoral Daerah
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.001 0 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

		Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2.17.01.2.01.001 2 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
		(Substansi) Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.17.01.2.01.001 3 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
	Meningkatny a Pengadminis trasian Keuangan Perangkat Daerah	(Berita Acara) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan

		Administrasi	Perangkat
		Pelaksanaan	Daerah
		Tugas ASN	Bacran
		(Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.02 -
		Dokumen	Administrasi
		Koordinasi dan	Keuangan
		Pelaksanaan	Perangkat
		Akuntansi SKPD	Daerah
		(Dokumen)	Daeran
			2.17.01.2.02 -
		Jumlah Dokumen	Administrasi
		Pelaporan dan	Keuangan
		Analisis	Perangkat
		Prognosis	Daerah
		Realisasi	
		Anggaran	
		(Dokumen)	0.17.01.0.00
		Jumlah	2.17.01.2.02 -
		Dokumen	Administrasi
		Penatausahaan	Keuangan
		dan	Perangkat
		Pengujian/Verifi	Daerah
		kasi Keuangan	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.02 -
		Keuangan Akhir	Administrasi
		Tahun SKPD dan	Keuangan
		Laporan Hasil	Perangkat
		_Koordinasi	Daerah
		Penyusunan	
		Laporan	
		Keuangan Akhir	
		Tahun SKPD	
		(Laporan)	

		Jumlah Laporan	2.17.01.2.02 -
		Keuangan	Administrasi
		Bulanan/	Keuangan
		Triwulanan/	Perangkat
		Semesteran	Daerah
		SKPD dan	Baeran
		Laporan	
		Koordinasi	
		Penyusunan	
		Laporan	
		Keuangan	
		Bulanan/Triwula	
		nan/Semesteran	
		SKPD (Laporan)	
		 Jumlah Orang	2.17.01.2.02 -
		yang Menerima	Administrasi
		Gaji dan	Keuangan
		Tunjangan ASN	Perangkat
		(Orang/bulan)	Daerah
		Jumlah Orang	2.17.01.2.02.000
		yang Menerima	1 - Penyediaan
		Gaji dan	Gaji dan
		Tunjangan ASN	Tunjangan ASN
		(Orang/bulan)	
		Jumlah	2.17.01.2.02.000
		Dokumen Hasil	2 - Penyediaan
		Penyediaan	Administrasi
		Administrasi	Pelaksanaan
		Pelaksanaan	Tugas ASN
		Tugas ASN	
		(Dokumen)	2.17.01.2.22
		Jumlah	2.17.01.2.02.000
		Dokumen	3 - Pelaksanaan
		Penatausahaan	Penatausahaan
		dan	dan
		Pengujian/Verifi	
		kasi Keuangan	Pengujian/Verifi

		SKPD (Dokumen)	kasi Keuangan SKPD
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 6 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2.17.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

			Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah	2.17.01.2.02.000
			Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Meningkatny a Penyelenggar aan Pengadminis trasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

		Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 1 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

		Jumlah	2.17.01.2.03.000
		Dokumen	
			2 - Pengamanan
		Pengamanan	Barang Milik
		Barang Milik	Daerah SKPD
		Daerah SKPD	
		(Dokumen)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Hasil Penilaian	3 - Koordinasi
		Barang Milik	dan Penilaian
		Daerah dan Hasil	Barang Milik
		Koordinasi	Daerah SKPD
		Penilaian Barang	
		Milik Daerah	
		SKPD (Laporan)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Hasil	4 - Pembinaan,
		Pembinaan,	Pengawasan, dan
		Pengawasan, dan	Pengendalian
		Pengendalian	Barang Milik
		Barang Milik	Daerah pada
		Daerah pada	SKPD
		SKPD (Laporan)	SKI D
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Rekonsiliasi dan	5 - Rekonsiliasi
		Penyusunan	dan Penyusunan
		Laporan Barang	Laporan Barang
		Milik Daerah	Milik Daerah
		pada SKPD	pada SKPD
		(Laporan)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Penatausahaan	6 -
		Barang Milik	Penatausahaan
		Daerah pada	Barang Milik
		SKPD (Laporan)	Daerah pada
		,	SKPD

			Jumlah	2.17.01.2.03.000
			Dokumen Hasil	7 - Pemanfaatan
			Pemanfaatan	Barang Milik
			Barang Milik	Daerah SKPD
			Daerah SKPD	Dacian Sixi D
			(Dokumen)	
		Meningkatny	Jumlah Data	2.17.01.2.04 -
		a	Objek, Subjek	Administrasi
		a Pengelolaan	dan Wajib	Pendapatan
		Pendapatan	Retribusi Daerah	Daerah
		Daerah		
			(Dokumen)	Kewenangan
		Kewenangan		Perangkat
		Perangkat		Daerah
		Daerah	T 1 1	0.17.01.0.04
			Jumlah	2.17.01.2.04 -
			Dokumen	Administrasi
			Rencana	Pendapatan
			Pengelolaan	Daerah
			Retribusi Daerah	Kewenangan
			(Dokumen)	Perangkat
				Daerah
			Jumlah Laporan	2.17.01.2.04 -
			Hasil	Administrasi
			Pengolahan,	Pendapatan
			Pemeliharaan,	Daerah
			dan Pelaporan	Kewenangan
			Data Retribusi	Perangkat
			Daerah (Laporan)	Daerah
			Jumlah	2.17.01.2.04.000
			Dokumen	1 - Perencanaan
			Rencana	Pengelolaan
			Pengelolaan	Retribusi Daerah
			Retribusi Daerah	
			(Dokumen)	
			Jumlah Data	2.17.01.2.04.000
			Objek, Subjek	4 - Pendataan
			dan Wajib	dan Pendaftaran

		Retribusi Daerah (Dokumen)	Objek Retribusi Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04.000 5 - Pengolahan Data Retribusi Daerah
	Meningkatny a Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

		Domandona	
		Perundang-	
		Undangan	
		(Orang)	
		Jumlah Orang	2.17.01.2.05 -
		yang Mengikuti	Administrasi
		Sosialisasi	Kepegawaian
		Peraturan	Perangkat
		Perundang-	Daerah
		Undangan	
		(Orang)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.05 -
		Pakaian Dinas	Administrasi
		beserta Atribut	Kepegawaian
		Kelengkapan	Perangkat
		(Paket)	Daerah
		Jumlah Pegawai	2.17.01.2.05 -
		Berdasarkan	Administrasi
		Tugas dan	Kepegawaian
		Fungsi yang	Perangkat
		Mengikuti	Daerah
		Pendidikan dan	
		Pelatihan	
		(Orang)	
		Jumlah Unit	2.17.01.2.05 -
		Peningkatan	Administrasi
		Sarana dan	Kepegawaian
		Prasarana	Perangkat
		Disiplin Pegawai	Daerah
		(Unit)	
		Jumlah Unit	2.17.01.2.05.000
		Peningkatan	1 - Peningkatan
		Sarana dan	Sarana dan
		Prasarana	Prasarana
		Disiplin Pegawai	Disiplin Pegawai
		(Unit)	

		Jumlah Paket	2.17.01.2.05.000
		Pakaian Dinas	2 - Pengadaan
		beserta Atribut	Pakaian Dinas
		Kelengkapan	beserta Atribut
		(Paket)	Kelengkapannya
		Jumlah	2.17.01.2.05.000
		Dokumen	3 - Pendataan
		Pendataan dan	dan Pengolahan
		Pengolahan	Administrasi
		Administrasi	Kepegawaian
		Kepegawaian	
		(Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.05.000
		Dokumen Hasil	4 - Koordinasi
		Koordinasi dan	dan Pelaksanaan
		Pelaksanaaan	Sistem Informasi
		Sistem Informasi	Kepegawaian
		Kepegawaian	nopogawaian
		(Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.05.000
		Dokumen	5 - Monitoring,
		Monitoring,	Evaluasi, dan
		Evaluasi, dan	Penilaian Kinerja
		Penilaian Kinerja	Pegawai
		Pegawai	regawar
		(Dokumen)	
		Jumlah Pegawai	2.17.01.2.05.000
		Berdasarkan	9 - Pendidikan
		Tugas dan	dan Pelatihan
		Fungsi yang	Pegawai Berdasarkan
		Mengikuti Pendidikan dan	
		Pendidikan dan Pelatihan	Tugas dan
			Fungsi
		(Orang)	0.17.01.0.05.001
		Jumlah Orang	2.17.01.2.05.001
		yang Mengikuti	0 - Sosialisasi
		Sosialisasi	Peraturan

			Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Perundang- Undangan
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.001 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
		Meningkatny a Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

		Jumlah Laporan	2.17.01.2.06 -
		Fasilitasi	Administrasi
		Kunjungan	Umum
		Tamu (Laporan)	Perangkat
		rama (Eaporam)	Daerah
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.06 -
		Penyelenggaraan	Administrasi
		Rapat Koordinasi	Umum
		dan Konsultasi	Perangkat
		SKPD (Laporan)	Daerah
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Bahan Logistik	Administrasi
		Kantor yang	Umum
		Disediakan	Perangkat
		(Paket)	Daerah
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Bahan/Material	Administrasi
		yang Disediakan	Umum
		(Paket)	Perangkat
		, ,	Daerah
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Barang Cetakan	Administrasi
		dan	Umum
		Penggandaan	Perangkat
		yang Disediakan	Daerah
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Komponen	Administrasi
		Instalasi	Umum
		Listrik/Penerang	Perangkat
		an Bangunan	Daerah
		Kantor yang	
		Disediakan	
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Peralatan dan	Administrasi
		Perlengkapan	Umum

		TZ +	D
		Kantor yang	Perangkat
		Disediakan	Daerah
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Peralatan Rumah	Administrasi
		Tangga yang	Umum
		Disediakan	Perangkat
		(Paket)	Daerah
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Komponen	1 - Penyediaan
		Instalasi	Komponen
		Listrik/Penerang	Instalasi
		an Bangunan	
		Kantor yang	Listrik/Penerang
		Disediakan	an Bangunan
		(Paket)	Kantor
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Peralatan dan	2 - Penyediaan
		Perlengkapan	Peralatan dan
		Kantor yang	Perlengkapan
		Disediakan	Kantor
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Peralatan Rumah	3 - Penyediaan
		Tangga yang	Peralatan Rumah
		Disediakan	Tangga
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Bahan Logistik	4 - Penyediaan
		Kantor yang	Bahan Logistik
		Disediakan	Kantor
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Barang Cetakan	5 - Penyediaan
		dan	Barang Cetakan
		Penggandaan	dan
		yang Disediakan	Penggandaan

		(Paket)	
		(raket)	
		Jumlah	2.17.01.2.06.000
		Dokumen Bahan	6 - Penyediaan
		Bacaan dan	Bahan Bacaan
		Peraturan	dan Peraturan
		Perundang-	Perundang-
		Undangan yang	undangan
		Disediakan	
		(Dokumen)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Bahan/Material	7 - Penyediaan
		yang Disediakan	Bahan/Material
		(Paket)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.06.000
		Fasilitasi	8 - Fasilitasi
		Kunjungan	Kunjungan
		Tamu (Laporan)	Tamu
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.06.000
		Penyelenggaraan	9 -
		Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan
		dan Konsultasi	Rapat Koordinasi
		SKPD (Laporan)	dan Konsultasi
			SKPD
		Jumlah	2.17.01.2.06.001
		Dokumen	O -
		Penatausahaan	Penatausahaan
		Arsip Dinamis	Arsip Dinamis
		pada SKPD	pada SKPD
		(Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.06.001
		Dokumen	1 - Dukungan
		Dukungan	Pelaksanaan
		Pelaksanaan	Sistem
		Sistem	Pemerintahan
		Pemerintahan	Berbasis

			Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Elektronik pada SKPD
		Meningkatny a Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Jumlah Unit	2.17.01.2.07 -
		Peralatan dan	Pengadaan
		Mesin Lainnya	Barang Milik
		yang Disediakan	Daerah
		(Unit)	Penunjang
		,	Urusan
			Pemerintah
			Daerah
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07 -
		Sarana dan	Pengadaan
		Prasarana	Barang Milik
		Gedung Kantor	Daerah
		atau Bangunan	Penunjang
		Lainnya yang	Urusan
		Disediakan (Unit)	Pemerintah
			Daerah
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07 -
		Sarana dan	Pengadaan
		Prasarana	Barang Milik
		Pendukung	Daerah
		Gedung Kantor	Penunjang
		atau Bangunan	Urusan
		Lainnya yang	Pemerintah
		Disediakan (Unit)	Daerah
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.000
		Kendaraan	1 - Pengadaan
		Perorangan	Kendaraan
		Dinas atau	Perorangan
		Kendaraan Dinas	Dinas atau
		Jabatan yang	Kendaraan Dinas
		Disediakan (Unit)	Jabatan
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.000
		Kendaraan Dinas	2 - Pengadaan
		Operasional atau	Kendaraan Dinas
		Lapangan yang	Operasional atau
		Disediakan (Unit)	Lapangan

			Jumlah Paket	2.17.01.2.07.000
			Mebel yang	5 - Pengadaan
			Disediakan (Unit)	Mebel
	<u>'</u>		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.000
	'		Peralatan dan	6 - Pengadaan
	'		Mesin Lainnya	Peralatan dan
	'		yang Disediakan	Mesin Lainnya
	'		(Unit)]
			Jumlah Únit	2.17.01.2.07.000
	'		Gedung Kantor	9 - Pengadaan
	'		atau Bangunan	Gedung Kantor
	'		Lainnya yang	atau Bangunan
			Disediakan (Unit)	Lainnya
			Jumlah Unit	2.17.01.2.07.001
	'		Sarana dan	0 - Pengadaan
	'		Prasarana	Sarana dan
	'		Gedung Kantor	Prasarana
	'		atau Bangunan	Gedung Kantor
	'		Lainnya yang	atau Bangunan
			Disediakan (Unit)	Lainnya
	'		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.001
	'		Sarana dan	1 - Pengadaan
	'		Prasarana	Sarana dan
	'		Pendukung	Prasarana
	'		Gedung Kantor	Pendukung
	'		atau Bangunan	Gedung Kantor
	'		Lainnya yang	atau Bangunan
		B.6. 1 .	Disediakan (Unit)	Lainnya
	'	Meningkatny	Jumlah Laporan	2.17.01.2.08 -
	'	a Dongololoon	Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa
	'	Pengelolaan dan	Komunikasi,	Penunjang Urusan
	'	dan Pengorganisa	Sumber Daya Air dan Listrik yang	Pemerintahan
	'	sian Jasa	Disediakan	Pemerintanan Daerah
	'	Penunjang	(Laporan)	Daeran
	'	Urusan	(Laporan)	
	'	Pemerintaha		
		rememmana	1	į l

	n Daerah		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2.17.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan

		Kantor yang Disediakan (Laporan)	Perlengkapan Kantor
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Meningkatny a Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemerintahan Daerah
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2.17.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		dibayarkan Pajak	Pemeliharaan,
		dan Perizinannya	Pajak dan
		(Unit)	Perizinan
		(31116)	Kendaraan Dinas
			Operasional atau
			Lapangan
		Jumlah	2.17.01.2.09.000
		Peralatan dan	6 - Pemeliharaan
		Mesin Lainnya	Peralatan dan
		yang Dipelihara	Mesin Lainnya
		(Unit)	Mesiii Laiiiiiya
		Jumlah Gedung	2.17.01.2.09.000
		Kantor dan	2.17.01.2.09.000 9 -
			_
		Bangunan	Pemeliharaan/Re
		Lainnya yang	habilitasi
		Dipelihara/Direh	Gedung Kantor
		abilitasi (Unit)	dan Bangunan
			Lainnya
		Jumlah Sarana	2.17.01.2.09.001
		dan Prasarana	0 -
		Gedung Kantor	Pemeliharaan/Re
		atau Bangunan	habilitasi Sarana
		Lainnya yang	dan Prasarana
		Dipelihara/Direh	Gedung Kantor
		abilitasi (Unit)	atau Bangunan
			Lainnya
	Meningkatnya	Pertumbuhan	2.17.07 -
	kapasitas UMKM	Wirausaha	PROGRAM
	yang tangguh	(Persentase)	PEMBERDAYAA
	dan mandiri		N USAHA
			MENENGAH,
			USAHA KECIL,
			DAN USAHA
			MIKRO (UMKM)

7 - AM
AYAA
HA
θAΗ,
ECIL,
AHA
MKM)
.01 -
yaan
ikro
kukan
ıi
an,
an,
han
an,
tan
gaan
linasi
Para
ku
igan
8
.01 -
yaan
ikro
rukan
ai
an,
an,
han
an,
tan

		Usaha Mikro (Orang)	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

1	I	T1-1- TT:4	0.17.07.0.01
		Jumlah Unit	2.17.07.2.01 -
		Usaha yang	Pemberdayaan
		Telah Menerima	Usaha Mikro
		Pembinaan dan	yang Dilakukan
		Pendampingan	Melalui
		Terhadap Usaha	Pendataan,
		Mikro (Unit	Kemitraan,
		Usaha)	Kemudahan
			Perizinan,
			Penguatan
			Kelembagaan
			dan Koordinasi
			dengan Para
			Pemangku
			Kepentingan
		Jumlah Usaha	2.17.07.2.01 -
		Mikro yang Telah	Pemberdayaan
		Mendapatkan	Usaha Mikro
		Perizinan (Unit	yang Dilakukan
		Usaha)	Melalui
		,	Pendataan,
			Kemitraan,
			Kemudahan
			Perizinan,
			Penguatan
			Kelembagaan
			dan Koordinasi
			dengan Para
			Pemangku
			Kepentingan
		Jumlah Usaha	2.17.07.2.01 -
		Mikro yang	Pemberdayaan
		terfasilitasi (Unit	Usaha Mikro
		Usaha)	yang Dilakukan
		,	Melalui
			Pendataan,
			Kemitraan,

			Kemudahan
			Perizinan,
			Penguatan
			Kelembagaan
			dan Koordinasi
			dengan Para
			Pemangku
			Kepentingan
		Jumlah Usaha	2.17.07.2.01 -
		Mikro yang	Pemberdayaan
		Terfasilitasi (Unit	Usaha Mikro
		Usaha) `	yang Dilakukan
		,	Melalui
			Pendataan,
			Kemitraan,
			Kemudahan
			Perizinan,
			Penguatan
			Kelembagaan
			dan Koordinasi
			dengan Para
			Pemangku
			Kepentingan
		Jumlah Unit	2.17.07.2.01.000
		Usaha yang	2 -
		Telah	Pemberdayaan
		Melaksanakan	Melalui
		Kemitraan Usaha	Kemitraan Usaha
		Mikro (Unit	Mikro
		Usaha)	
		Jumlah Usaha	2.17.07.2.01.000
		Mikro yang Telah	3 - Fasilitasi
		Mendapatkan	Kemudahan
		Perizinan (Unit	Perizinan Usaha
		Usaha)	Mikro

		Jumlah Unit	2.17.07.2.01.000
		Usaha yang	4 -
		Telah Menerima	Pemberdayaan
		Pembinaan dan	Kelembagaan
		Pendampingan	Potensi dan
		Terhadap Usaha	Pengembangan
		Mikro (Unit	Usaha Mikro
		Usaha)	
		Jumlah SDM	2.17.07.2.01.000
		yang Telah	5 - Koordinasi
		Melakukan	dan Sinkronisasi
		Koordinasi dan	dengan Para
		Sinkronisasi	Pemangku
		dengan Para	Kepentingan
		Pemangku	dalam
		Kepentingan	Pemberdayaan
		dalam	Usaha Mikro
		Pemberdayaan	
		Usaha Mikro	
		(Orang)	
		Jumlah Usaha	2.17.07.2.01.000
		Mikro yang	7 - Pelatihan dan
		Terfasilitasi (Unit	Pendampingan
		Usaha)	Pemanfaataan
			Sistem Aplikasi
			Pembukuan/Pen
			catatan
			Keuangan Usaha
			Mikro dan Usaha
		Jumlah Usaha	Kecil 2.17.07.2.01.000
		Mikro yang	8 - Pemulihan
		Terfasilitasi (Unit	Usaha Mikro
		Usaha)	Osana wikio
		Jumlah Usaha	2.17.07.2.01.000
		Mikro yang	9 - Fasilitasi Hak
		terfasilitasi (Unit	Kekayaan
		terrasiiitasi (Oiiit	ixchayaan

		Usaha)	Intelektual
			Usaha Kecil
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 0 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 1 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 2 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 3 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 4 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.001 5 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan

	meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM
		Meningkatny a Kegiatan Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.000 2 - Pengembangan Usaha Mikro
	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.000 6 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Meningkatnya potensi dan ekspansi koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (%)	

Meningkatnya		Nilai AKIP	2.17.01 -
Pelayanan		Perangkat	PROGRAM
Administrasi		Daerah (Nilai)	PENUNJANG
Perkantoran		Bacran (ivilar)	URUSAN
1 el Kalltorall			PEMERINTAHAN
			DAERAH
			KABUPATEN/KO
			TA
	M :1 +	Jumlah Berita	2.17.01.2.01 -
	Meningkatny		
	a	Acara Hasil	Perencanaan,
	Pelaksanaan	Forum Perangkat	Penganggaran,
	Penyusunan	Daerah	dan Evaluasi
	Perencanaan	Berdasarkan	Kinerja
	dan	Bidang Urusan	Perangkat
	Pendanaan	yang Diampu	Daerah
	Perangkat	dalam Rangka	
	Daerah	Penyusunan	
		Dokumen	
		Perencanaan	
		Perangkat	
		Daerah (Berita	
		Acara)	
		Jumlah Berita	2.17.01.2.01 -
		Acara Hasil	Perencanaan,
		Sinkronisasi dan	Penganggaran,
		Harmonisasi	dan Evaluasi
		Pusat dan	Kinerja
		Daerah dalam	Perangkat
		Rangka	Daerah
		Mendukung	
		Target	
		Pembangunan	
		Nasional melalui	
		Koordinasi	
		Teknis	
		Pembangunan	
		(Berita Acara)	

		Jumlah Data	2.17.01.2.01 -
		Statistik Sektoral	Perencanaan,
		Daerah yang	Penganggaran,
		Telah	dan Evaluasi
		Dikumpulkan	Kinerja
		dan Diperiksa	Perangkat
		Lingkup	Daerah
		Perangkat	Dacian
		Daerah (Data)	
		Jumlah	2.17.01.2.01 -
		Dokumen DPA-	Perencanaan,
		SKPD dan	Penganggaran,
		Laporan Hasil	dan Evaluasi
		Koordinasi	Kinerja
		Penyusunan	Perangkat
		Dokumen DPA-	Daerah
		SKPD (Dokumen)	Dacian
		Jumlah	2.17.01.2.01 -
		Dokumen Hasil	Perencanaan,
		Penyelenggaraan	Penganggaran,
		Walidata	dan Evaluasi
		Pendukung	Kinerja
		Statistik Sektoral	Perangkat
		Daerah	Daerah
		(Dokumen)	Dacian
		Jumlah	2.17.01.2.01 -
		Dokumen	Perencanaan,
		Perencanaan	Penganggaran,
		Perangkat	dan Evaluasi
		Daerah	Kinerja
		(Dokumen)	Perangkat
		(Dokumen)	Daerah
		Jumlah	2.17.01.2.01 -
		Dokumen	Perencanaan,
		Perencanaan	Penganggaran,
		Urusan Selain	dan Evaluasi
		Renstra PD dan	Kinerja
		Kensua i D uali	minerja

		Renja PD yang disusun (Dokumen)	Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

		Laporan Hasil	Perangkat
		Koordinasi	Daerah
		Penyusunan	Bacran
		Laporan Capaian	
		Kinerja dan	
		Ikhtisar Realisasi	
		Kinerja SKPD	
		(Laporan)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.01 -
		Evaluasi Kinerja	Perencanaan,
		Perangkat	Penganggaran,
		Daerah (Laporan)	dan Evaluasi
		· - · ·	Kinerja
			Perangkat
			Daerah
		Jumlah Subtansi	2.17.01.2.01 -
		Koordinasi	Perencanaan,
		Peningkatan	Penganggaran,
		Partisipasi	dan Evaluasi
		Masyarakat	Kinerja
		dalam	Perangkat
		Penyelenggaraan	Daerah
		Urusan	
		Pemerintahan	
		Daerah yang	
		Diampu	
		 (Substansi)	
	 	 Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen	1 - Penyusunan
		Perencanaan	Dokumen
		Perangkat	Perencanaan
		Daerah	Perangkat
		(Dokumen)	Daerah
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen RKA-	2 - Koordinasi
		SKPD dan	dan Penyusunan
		Laporan Hasil	Dokumen RKA-

		Koordinasi	SKPD
		Penyusunan	-
		Dokumen RKA-	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen	3 - Koordinasi
		Perubahan RKA-	dan Penyusunan
		SKPD dan	Dokumen
		Laporan Hasil	Perubahan RKA-
		Koordinasi	SKPD
		Penyusunan	
		Dokumen	
		Perubahan RKA-	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen DPA-	4 - Koordinasi
		SKPD dan	dan Penyusunan
		Laporan Hasil	DPA-SKPD
		Koordinasi	
		Penyusunan	
		Dokumen DPA-	
		SKPD (Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.000
		Dokumen	5 - Koordinasi
		Perubahan DPA-	dan Penyusunan
		SKPD dan	Perubahan DPA-
		Laporan Hasil	SKPD
		Koordinasi	
		Penyusunan	
		Dokumen	
		Perubahan DPA-	
		SKPD (Dokumen)	

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.17.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 8 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

	1		1
		Jumlah Berita	2.17.01.2.01.001
		Acara Hasil	0 - Pelaksanaan
		Forum Perangkat	Forum Perangkat
		Daerah	Daerah
		Berdasarkan	Berdasarkan
		Bidang Urusan	Bidang Urusan
		yang Diampu	yang Diampu
		dalam Rangka	dalam Rangka
		Penyusunan	Penyusunan
		Dokumen	Dokumen
		Perencanaan	Perencanaan
		Perangkat	Perangkat
		Daerah (Berita	Daerah
		Acara)	
		Jumlah	2.17.01.2.01.001
		Dokumen	1 - Penyusunan
		Perencanaan	Dokumen
		Urusan Selain	Perencanaan
		Renstra PD dan	Urusan Selain
		Renja PD yang	Renstra PD dan
		disusun	Renja PD
		(Dokumen)	
		Jumlah Subtansi	2.17.01.2.01.001
		Koordinasi	2 - Koordinasi
		Peningkatan	Peningkatan
		Partisipasi	Partisipasi
		Masyarakat	Masyarakat
		dalam	dalam
		Penyelenggaraan	Penyelenggaraan
		Urusan	Urusan
		Pemerintahan	Pemerintahan
		Daerah yang	Daerah yang
		Diampu	Diampu
		(Substansi)	

			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi	2.17.01.2.01.001 3 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan
			Pusat dan	Daerah dalam
			Daerah dalam	Rangka
			Rangka	Mendukung
			Mendukung	Target
			Target	Pembangunan
			Pembangunan	Nasional melalui
			Nasional melalui	Koordinasi
			Koordinasi Teknis	Teknis
			Pembangunan	Pembangunan
			(Berita Acara)	
		Meningkatny	Jumlah	2.17.01.2.02 -
		a	Dokumen Bahan	Administrasi
		Pengadminis	Tanggapan	Keuangan
		trasian	Pemeriksaan dan	Perangkat
		Keuangan	Tindak Lanjut	Daerah
		Perangkat	Pemeriksaan	
		Daerah	(Dokumen)	
			Jumlah	2.17.01.2.02 -
			Dokumen Hasil	Administrasi
			Penyediaan	Keuangan
			Administrasi	Perangkat
			Pelaksanaan	Daerah
			Tugas ASN	
			(Dokumen)	0.17.01.0.00
			Jumlah	2.17.01.2.02 -
			Dokumen Voordingsi dan	Administrasi
			Koordinasi dan Pelaksanaan	Keuangan
			Akuntansi SKPD	Perangkat Daerah
				Daeran
			(Dokumen)	

T ₂	ımlah 2.17.01.2.02 -
	kumen Administrasi
	nalisis Perangkat
	gnosis Daerah
	alisasi
	ggaran
	kumen)
	ımlah 2.17.01.2.02 -
	kumen Administrasi
	ausahaan Keuangan
	dan Perangkat
	ian/Verifi Daerah
	Keuangan
	Dokumen)
Jumla:	h Laporan 2.17.01.2.02 -
Keuan	gan Akhir Administrasi
Tahun	SKPD dan Keuangan
Lapoi	ran Hasil Perangkat
Koo	rdinasi Daerah
Peny	usunan
	poran
	gan Akhir
Tahu	in SKPD
(La	poran)
	h Laporan 2.17.01.2.02 -
	nangan Administrasi
	lanan/ Keuangan
Triw	ulanan/ Perangkat
	esteran Daerah
	PD dan
	poran
	rdinasi
	usunan
	poran
	langan
	n/Triwula

		100	
		nan/Semesteran	
		SKPD (Laporan)	
		Jumlah Orang	2.17.01.2.02 -
		yang Menerima	Administrasi
		Gaji dan	Keuangan
		Tunjangan ASN	Perangkat
		(Orang/bulan)	Daerah
		Jumlah Orang	2.17.01.2.02.000
		yang Menerima	1 - Penyediaan
		Gaji dan	Gaji dan
		Tunjangan ASN	
			Tunjangan ASN
		(Orang/bulan)	2.17.01.2.02.000
		Jumlah	
		Dokumen Hasil	2 - Penyediaan
		Penyediaan	Administrasi
		Administrasi	Pelaksanaan
		Pelaksanaan	Tugas ASN
		Tugas ASN	
		(Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.02.000
		Dokumen	3 - Pelaksanaan
		Penatausahaan	Penatausahaan
		dan	dan
		Pengujian/Verifi	
		kasi Keuangan	Pengujian/Verifi
		SKPD (Dokumen)	kasi Keuangan
		 	SKPD
		Jumlah	2.17.01.2.02.000
		Dokumen	4 - Koordinasi
		Koordinasi dan	dan Pelaksanaan
		Pelaksanaan	Akuntansi SKPD
		Akuntansi SKPD	
		(Dokumen)	

	I	т 11т	0.17.01.0.00.000
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.02.000
		Keuangan Akhir	5 - Koordinasi
		Tahun SKPD dan	dan Penyusunan
		Laporan Hasil	Laporan
		Koordinasi	Keuangan Akhir
		Penyusunan	Tahun SKPD
		Laporan	
		Keuangan Akhir	
		Tahun SKPD	
		 (Laporan)	
		Jumlah	2.17.01.2.02.000
		Dokumen Bahan	6 - Pengelolaan
		Tanggapan	dan Penyiapan
		Pemeriksaan dan	Bahan
		Tindak Lanjut	Tanggapan
		Pemeriksaan	Pemeriksaan
		(Dokumen)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.02.000
		Keuangan	7 - Koordinasi
		Bulanan/	dan Penyusunan
		Triwulanan/	Laporan
		Semesteran	Keuangan
		SKPD dan	Bulanan/
		Laporan	Triwulanan/
		Koordinasi	Semesteran
		Penyusunan	SKPD
		Laporan	
		Keuangan	
		Bulanan/Triwula	
		nan/Semesteran	
		SKPD (Laporan)	
		Jumlah	2.17.01.2.02.000
		Dokumen	8 - Penyusunan
		Pelaporan dan	Pelaporan dan
		Analisis	Analisis
		Prognosis	Prognosis
		Realisasi	Realisasi

		Anggaran (Dokumen)	Anggaran
	Meningkatny a Penyelenggar aan Pengadminis trasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

		T 1 1 T	0.17.01.0.00
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03 -
		Penatausahaan	Administrasi
		Barang Milik	Barang Milik
		Daerah pada	Daerah pada
		SKPD (Laporan)	Perangkat
			Daerah
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03 -
		Rekonsiliasi dan	Administrasi
		Penyusunan	Barang Milik
		Laporan Barang	Daerah pada
		Milik Daerah	Perangkat
		pada SKPD	Daerah
		(Laporan)	
		Jumlah Rencana	2.17.01.2.03 -
		Kebutuhan	Administrasi
		Barang Milik	Barang Milik
		Daerah SKPD	Daerah pada
		(Dokumen)	Perangkat
		,	Daerah
		Jumlah Rencana	2.17.01.2.03.000
		Kebutuhan	1 - Penyusunan
		Barang Milik	Perencanaan
		Daerah SKPD	Kebutuhan
		(Dokumen)	Barang Milik
		, ,	Daerah SKPD
		Jumlah	2.17.01.2.03.000
		Dokumen	2 - Pengamanan
		Pengamanan	Barang Milik
		Barang Milik	Daerah SKPD
		Daerah SKPD	
		(Dokumen)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Hasil Penilaian	3 - Koordinasi
		Barang Milik	dan Penilaian
		Daerah dan Hasil	Barang Milik
		Koordinasi	Daerah SKPD
		Penilaian Barang	

	T	M:1:1 D 1	
		Milik Daerah	
		SKPD (Laporan)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Hasil	4 - Pembinaan,
		Pembinaan,	Pengawasan, dan
		Pengawasan, dan	Pengendalian
		Pengendalian	Barang Milik
		Barang Milik	Daerah pada
		Daerah pada	SKPD
		SKPD (Laporan)	
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Rekonsiliasi dan	5 - Rekonsiliasi
		Penyusunan	dan Penyusunan
		Laporan Barang	Laporan Barang
		Milik Daerah	Milik Daerah
		pada SKPD	pada SKPD
		(Laporan)	pada SKI B
		Jumlah Laporan	2.17.01.2.03.000
		Penatausahaan	6 -
		Barang Milik	Penatausahaan
		Daerah pada	Barang Milik
		SKPD (Laporan)	Daerah pada
		CIII E (Eaporaii)	SKPD
		Jumlah	2.17.01.2.03.000
		Dokumen Hasil	7 - Pemanfaatan
		Pemanfaatan	Barang Milik
		Barang Milik	Daerah SKPD
		Daerah SKPD	
		(Dokumen)	
	Meningkatny	Jumlah Data	2.17.01.2.04 -
	a	Objek, Subjek	Administrasi
	Pengelolaan	dan Wajib	Pendapatan
	Pendapatan	Retribusi Daerah	Daerah
	Daerah	(Dokumen)	Kewenangan
	Kewenangan	(Perangkat

		Perangkat Daerah		Daerah
			Jumlah	2.17.01.2.04 -
			Dokumen	Administrasi
			Rencana	Pendapatan
			Pengelolaan	Daerah
			Retribusi Daerah	Kewenangan
			(Dokumen)	Perangkat
				Daerah
			Jumlah Laporan	2.17.01.2.04 -
			Hasil	Administrasi
			Pengolahan,	Pendapatan
			Pemeliharaan,	Daerah
			dan Pelaporan	Kewenangan
			Data Retribusi	Perangkat
			Daerah (Laporan)	Daerah
			Jumlah	2.17.01.2.04.000
			Dokumen	1 - Perencanaan
			Rencana	Pengelolaan
			Pengelolaan	Retribusi Daerah
			Retribusi Daerah	
			(Dokumen)	
			Jumlah Data	2.17.01.2.04.000
			Objek, Subjek	4 - Pendataan
			dan Wajib	dan Pendaftaran
			Retribusi Daerah	Objek Retribusi
			(Dokumen)	Daerah
			Jumlah Laporan	2.17.01.2.04.000
			Hasil	5 - Pengolahan
			Pengolahan,	Data Retribusi
			Pemeliharaan,	Daerah
			dan Pelaporan	
			Data Retribusi	
			Daerah (Laporan)	

		Meningkatny	Jumlah	2.17.01.2.05 -
		a	Dokumen Hasil	Administrasi
		Pengelolaan	Koordinasi dan	Kepegawaian
		Administrasi	Pelaksanaaan	Perangkat
		Kepegawaian	Sistem Informasi	Daerah
		Perangkat	Kepegawaian	
		Daerah	(Dokumen)	
			Jumlah	2.17.01.2.05 -
			Dokumen	Administrasi
			Monitoring,	Kepegawaian
			Evaluasi, dan	Perangkat
			Penilaian Kinerja	Daerah
			Pegawai	
			(Dokumen)	
			Jumlah	2.17.01.2.05 -
			Dokumen	Administrasi
			Pendataan dan	Kepegawaian
			Pengolahan	Perangkat
			Administrasi	Daerah
			Kepegawaian	
			(Dokumen)	
			Jumlah Orang	2.17.01.2.05 -
			yang Mengikuti	Administrasi
			Bimbingan	Kepegawaian
			Teknis	Perangkat
			Implementasi	Daerah
			Peraturan	
			Perundang-	
			Undangan	
			(Orang)	
			Jumlah Orang	2.17.01.2.05 -
			yang Mengikuti	Administrasi
			Sosialisasi	Kepegawaian
			Peraturan	Perangkat
			Perundang-	Daerah
			Undangan	
			(Orang)	

			Jumlah Paket	2.17.01.2.05 -
			Pakaian Dinas	Administrasi
			beserta Atribut	Kepegawaian
			Kelengkapan	
				Perangkat
			(Paket)	Daerah 2.17.01.2.05 -
			Jumlah Pegawai	
			Berdasarkan	Administrasi
			Tugas dan	Kepegawaian
			Fungsi yang	Perangkat
			Mengikuti	Daerah
			Pendidikan dan	
			Pelatihan	
			(Orang)	
			Jumlah Unit	2.17.01.2.05 -
			Peningkatan	Administrasi
			Sarana dan	Kepegawaian
			Prasarana	Perangkat
			Disiplin Pegawai	Daerah
			(Unit)	
			Jumlah Unit	2.17.01.2.05.000
			Peningkatan	1 - Peningkatan
			Sarana dan	Sarana dan
			Prasarana	Prasarana
			Disiplin Pegawai	Disiplin Pegawai
			(Unit)	
			Jumlah Paket	2.17.01.2.05.000
			Pakaian Dinas	2 - Pengadaan
			beserta Atribut	Pakaian Dinas
			Kelengkapan	beserta Atribut
			(Paket)	Kelengkapannya
	·		Jumlah	2.17.01.2.05.000
			Dokumen	3 - Pendataan
			Pendataan dan	dan Pengolahan
			Pengolahan	Administrasi
			Administrasi	Kepegawaian
			Kepegawaian	
			(Dokumen)	

		Jumlah	2.17.01.2.05.000
		Dokumen Hasil	4 - Koordinasi
		Koordinasi dan	dan Pelaksanaan
		Pelaksanaaan	Sistem Informasi
		Sistem Informasi	Kepegawaian
		Kepegawaian	110pogawaian
		(Dokumen)	
		Jumlah	2.17.01.2.05.000
		Dokumen	5 - Monitoring,
		Monitoring,	Evaluasi, dan
		Evaluasi, dan	Penilaian Kinerja
		Penilaian Kinerja	Pegawai
		Pegawai	
		(Dokumen)	
		Jumlah Pegawai	2.17.01.2.05.000
		Berdasarkan	9 - Pendidikan
		Tugas dan	dan Pelatihan
		Fungsi yang	Pegawai
		Mengikuti	Berdasarkan
		Pendidikan dan	Tugas dan
		Pelatihan	Fungsi
		(Orang)	
		 Jumlah Orang	2.17.01.2.05.001
		yang Mengikuti	0 - Sosialisasi
		Sosialisasi	Peraturan
		Peraturan	Perundang-
		Perundang-	Undangan
		Undangan	
		(Orang)	
		Jumlah Orang	2.17.01.2.05.001
		yang Mengikuti	1 - Bimbingan
		Bimbingan	Teknis
		Teknis	Implementasi
		Implementasi	Peraturan
		Peraturan	Perundang-
		Perundang-	Undangan
		Undangan	

			(Orang)	
		Moninglyothy	Jumlah	2.17.01.2.06 -
		Meningkatny a Dokumen	Dokumen Bahan	Administrasi
		Pengelolaan	Bacaan dan	Umum
		Perangkat	Peraturan	Perangkat
		Daerah	Perundang-	Daerah
		Bacran	Undangan yang	Baeran
			Disediakan	
			(Dokumen)	
			Jumlah	2.17.01.2.06 -
			Dokumen	Administrasi
			Dukungan	Umum
			Pelaksanaan	Perangkat
			Sistem	Daerah
			Pemerintahan	
			Berbasis	
			Elektronik pada	
			SKPD (Dokumen)	
			Jumlah	2.17.01.2.06 -
			Dokumen	Administrasi
			Penatausahaan	Umum
			Arsip Dinamis	Perangkat
			pada SKPD	Daerah
			(Dokumen) Jumlah Laporan	2.17.01.2.06 -
			Fasilitasi	Administrasi
			Kunjungan	Umum
			Tamu (Laporan)	Perangkat
			Tama (Daporan)	Daerah
			Jumlah Laporan	2.17.01.2.06 -
			Penyelenggaraan	Administrasi
			Rapat Koordinasi	Umum
			dan Konsultasi	Perangkat
			SKPD (Laporan)	Daerah

		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
			Administrasi
		Bahan Logistik	
		Kantor yang	Umum
		Disediakan	Perangkat
		(Paket)	Daerah
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Bahan/Material	Administrasi
		yang Disediakan	Umum
		(Paket)	Perangkat
			Daerah
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Barang Cetakan	Administrasi
		dan	Umum
		Penggandaan	Perangkat
		yang Disediakan	Daerah
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Komponen	Administrasi
		Instalasi	Umum
		Listrik/Penerang	Perangkat
		an Bangunan	Daerah
		Kantor yang	
		Disediakan	
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Peralatan dan	Administrasi
		Perlengkapan	Umum
		Kantor yang	Perangkat
		Disediakan	Daerah
		(Paket)	
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06 -
		Peralatan Rumah	Administrasi
		Tangga yang	Umum
		Disediakan	Perangkat
		(Paket)	Daerah

		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Komponen	1 - Penyediaan
		Instalasi	Komponen
		Listrik/Penerang	Instalasi
		an Bangunan	IIIstalasi
		Kantor yang	Listrik/Penerang
		Disediakan	an Bangunan
		(Paket)	Kantor
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Peralatan dan	2 - Penyediaan
		Perlengkapan	Peralatan dan
			Perlengkapan
		Kantor yang Disediakan	Kantor
		(Paket)	Kantoi
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Peralatan Rumah	3 - Penyediaan
		Tangga yang	Peralatan Rumah
		Disediakan	Tangga
		(Paket)	i angga
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Bahan Logistik	4 - Penyediaan
		Kantor yang	Bahan Logistik
		Disediakan	Kantor
		(Paket)	11411101
		Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
		Barang Cetakan	5 - Penyediaan
		dan	Barang Cetakan
		Penggandaan	dan
		yang Disediakan	Penggandaan
		(Paket)	33
		Jumlah	2.17.01.2.06.000
		Dokumen Bahan	6 - Penyediaan
		Bacaan dan	Bahan Bacaan
		Peraturan	dan Peraturan
		Perundang-	Perundang-
		Undangan yang	undangan
		Disediakan	

		1	(Dolores es)	
			(Dokumen)	
			Jumlah Paket	2.17.01.2.06.000
			Bahan/Material	7 - Penyediaan
			yang Disediakan	Bahan/Material
			(Paket)	,
			Jumlah Laporan	2.17.01.2.06.000
			Fasilitasi	8 - Fasilitasi
			Kunjungan	Kunjungan
			Tamu (Laporan)	Tamu
			Jumlah Laporan	2.17.01.2.06.000
			Penyelenggaraan	9 -
			Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan
			dan Konsultasi	Rapat Koordinasi
			SKPD (Laporan)	dan Konsultasi
				SKPD
			Jumlah	2.17.01.2.06.001
			Dokumen	O -
			Penatausahaan	Penatausahaan
			Arsip Dinamis	Arsip Dinamis
			pada SKPD	pada SKPD
			(Dokumen)	
			Jumlah	2.17.01.2.06.001
			Dokumen	1 - Dukungan
			Dukungan	Pelaksanaan
			Pelaksanaan	Sistem
			Sistem	Pemerintahan
			Pemerintahan	Berbasis
			Berbasis	Elektronik pada
			Elektronik pada	SKPD
			SKPD (Dokumen)	
		Meningkatny	Jumlah Paket	2.17.01.2.07 -
		a Pengadaan	Mebel yang	Pengadaan
		Barang Milik	Disediakan (Unit)	Barang Milik
		Daerah	` '	Daerah

	(BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Jumlah Unit	2.17.01.2.07 -
		Sarana dan	Pengadaan
		Prasarana	Barang Milik
		Gedung Kantor	Daerah
		atau Bangunan	Penunjang
		Lainnya yang	Urusan
		Disediakan (Unit)	Pemerintah
		,	Daerah
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07 -
		Sarana dan	Pengadaan
		Prasarana	Barang Milik
		Pendukung	Daerah
		Gedung Kantor	Penunjang
		atau Bangunan	Urusan
		Lainnya yang	Pemerintah
		Disediakan (Unit)	Daerah
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.000
		Kendaraan	1 - Pengadaan
		Perorangan	Kendaraan
		Dinas atau	Perorangan
		Kendaraan Dinas	Dinas atau
		Jabatan yang	Kendaraan Dinas
		Disediakan (Unit)	Jabatan
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.000
		Kendaraan Dinas	2 - Pengadaan
		Operasional atau	Kendaraan Dinas
		Lapangan yang	Operasional atau
		Disediakan (Unit)	Lapangan
		Jumlah Paket	2.17.01.2.07.000
		Mebel yang	5 - Pengadaan
		Disediakan (Unit)	Mebel
		Jumlah Unit	2.17.01.2.07.000
		Peralatan dan	6 - Pengadaan
		Mesin Lainnya	Peralatan dan
		yang Disediakan	Mesin Lainnya
		(Unit)	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) INDIKATOR	2.17.01.2.07.000 9 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.001 0 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.17.01.2.07.001 1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatny a Pengelolaan dan Pengorganisa sian Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		n Daerah		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
			Kantor yang Disediakan (Laporan)	Pemerintahan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	2.17.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan

Penyed Pela Umun yang D: (Lap Meningkatny a Pemeliharaa n Sarana lainn dan Dipeliha Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Laporan aan Jasa vanan Kantor sediakan oran) Gedung or dan	2.17.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
a Kant Pemeliharaa Ban n Sarana Lainn dan Dipeliha Prasarana abilita Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		
	gunan ya yang .ra/Direh si (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kendara Operasi Lapan Dipelil dibayar dan Per	nlah an Dinas onal atau an yang ara dan an Pajak zinannya nit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemerintahan Daerah
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2.17.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

			dibayarkan Pajak	Pemeliharaan,
			dan Perizinannya	Pajak dan
			(Unit)	Perizinan
			,	Kendaraan Dinas
				Operasional atau
				Lapangan
			Jumlah	2.17.01.2.09.000
			Peralatan dan	6 - Pemeliharaan
			Mesin Lainnya	Peralatan dan
			yang Dipelihara	Mesin Lainnya
			(Unit)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jumlah Gedung	2.17.01.2.09.000
			Kantor dan	9 -
			Bangunan	Pemeliharaan/Re
			Lainnya yang	habilitasi
			Dipelihara/Direh	Gedung Kantor
			abilitasi (Unit)	dan Bangunan
				Lainnya
			Jumlah Sarana	2.17.01.2.09.001
			dan Prasarana	0 -
			Gedung Kantor	Pemeliharaan/Re
			atau Bangunan	habilitasi Sarana
			Lainnya yang	dan Prasarana
			Dipelihara/Direh	Gedung Kantor
			abilitasi (Unit)	atau Bangunan
	35		5 . 1 1	Lainnya
	Meningkatnya		Pertumbuhan	2.17.02 -
	kualitas layanan		Volume Usaha	PROGRAM
	izin usaha		Koperasi	PELAYANAN IZIN
	simpan pinjam		(Persentase)	USAHA SIMPAN
				PINJAM

1	3.6 . 1 .	T 1 1 TT 1	0.17.00.001
	Meningkatny	Jumlah Usaha	2.17.02.2.01 -
	a	Simpan Pinjam	Penerbitan Izin
	Pelaksanaan	dan Pembukaan	Usaha Simpan
	Penerbitan	Kantor Cabang,	Pinjam untuk
	Izin Usaha	Cabang	Koperasi dengan
	Simpan	Pembantu dan	Wilayah
	Pinjam	Kantor Kas	Keanggotaan
	untuk	Koperasi Simpan	dalam Daerah
	Koperasi	Pinjam untuk	Kabupaten/Kota
	dengan	Koperasi dengan	
	Wilayah	Wilayah	
	Keanggotaan	Keanggotaan	
	dalam	dalam Daerah	
	Daerah	Kabupaten/Kota	
		(Unit Usaha)	
		Jumlah Usaha	2.17.02.2.01.000
		Simpan Pinjam	1 - Fasilitasi
		dan Pembukaan	Pemenuhan Izin
		Kantor Cabang,	Usaha Simpan
		Cabang	Pinjam dan
		Pembantu dan	Pembukaan
		Kantor Kas	Kantor Cabang,
		Koperasi Simpan	Cabang
		Pinjam untuk	Pembantu dan
		Koperasi dengan	Kantor Kas
		Wilayah	Koperasi Simpan
		Keanggotaan	Pinjam untuk
		dalam Daerah	Koperasi dengan
		Kabupaten/Kota	Wilayah
		(Unit Usaha)	Keanggotaan
		'	dalam Daerah
			Kabupaten/Kota

3.6 . 1 .	T 1 1 TZ 4	0.17.00.0.00
Meningkatny	Jumlah Kantor	2.17.02.2.02 -
a	Cabang, Cabang	Penerbitan Izin
Pelaksanaan	Pembantu dan	Pembukaan
Penerbitan	Kantor Kas	Kantor Cabang,
Izin	Koperasi Simpan	Cabang
Pembukaan	Pinjam untuk	Pembantu dan
Kantor	Koperasi dengan	Kantor Kas
Cabang,	Wilayah	Koperasi Simpan
Cabang	Keanggotaan	Pinjam untuk
Pembantu	dalam Daerah	Koperasi dengan
dan Kantor	Kabupaten/Kota	Wilayah
Kas Koperasi	(Unit Usaha)	Keanggotaan
Simpan	(dalam Daerah
Pinjam		Kabupaten/Kota
untuk		1145 4 pare 11, 115 ta
Koperasi		
dengan		
Wilayah		
Keanggotaan		
dalam		
Daerah		
Daeran	Jumlah Kantor	2.17.02.2.02.000
		1 - Fasilitasi
	Cabang, Cabang	
	Pembantu dan	Pemenuhan Izin
	Kantor Kas	Usaha
	Koperasi Simpan	Pembukaan
	Pinjam untuk	Kantor Cabang,
	Koperasi dengan	Cabang
	Wilayah	Pembantu dan
	Keanggotaan	Kantor Kas
	dalam Daerah	Koperasi Simpan
	Kabupaten/Kota	Pinjam untuk
	(Unit Usaha)	Koperasi dengan
	·	Wilayah
		Keanggotaan
		dalam Daerah
		Kabupaten/Kota

meningkatnya		Persentase	2.17.03 -
pembinaan dan		Pengawasan dan	PROGRAM
		Pemeriksaan	PENGAWASAN
pengawasan			
koperasi		Koperasi	DAN
		(Persentase)	PEMERIKSAAN
			KOPERASI
	Meningkatny	Jumlah Koperasi	2.17.03.2.01 -
	a Kegiatan	yang Dilakukan	Pemeriksaan dan
	Pelaksanaan	Penguatan Tata	Pengawasan
	Pemeriksaan	Kelola	Koperasi,
	dan	Kelembagaan	Koperasi Simpan
	Pengawasan	Koperasi (Unit	Pinjam/Unit
	Koperasi,	Usaha)	Simpan Pinjam
	Koperasi	,	Koperasi yang
	Simpan		Wilayah
	Pinjam/Unit		Keanggotaannya
	Simpan		dalam Daerah
	Pinjam		Kabupaten/ Kota
	Koperasi		Hasapatelly Hota
	yang		
	Wilayah		
	Keanggotaan		
	nya dalam		
	Daerah		
	Daeran	Installate Mamana :	2.17.03.2.01 -
		Jumlah Koperasi	
		yang telah	Pemeriksaan dan
		dilakukan	Pengawasan
		Pemeriksaan dan	Koperasi,
		Pengawasan	Koperasi Simpan
		(Unit Usaha)	Pinjam/Unit
			Simpan Pinjam
			Koperasi yang
			Wilayah
			Keanggotaannya
			dalam Daerah
			Kabupaten/ Kota

			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.000 3 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.000 4 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
	meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
		Meningkatny a Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

		ya dalam 1		
		(Satu)		
		Daerah		
		Dactail		
			Jumlah Unit	2.17.04.2.01 -
			Usaha Koperasi	Penilaian
			yang Telah	Kesehatan
			Dilakukan	Koperasi Simpan
			Penilaian	Pinjam/Unit
			Kesehatan (Unit	Simpan Pinjam
			Usaha)	Koperasi yang
				Wilayah
				Keanggotaanya
				dalam 1 (Satu)
				Daerah
				Kabupaten/Kota
			Jumlah Unit	2.17.04.2.01.000
			Usaha Koperasi	1 - Pelaksanaan
			yang Telah	Penilaian
			Dilakukan	Kesehatan
			Penilaian	KSP/USP
			Kesehatan (Unit	Koperasi
			Usaha)	Kewenangan
				Kabupaten/Kota
			Jumlah Koperasi	2.17.04.2.01.000
			yang Diberikan	3 - Penilaian
			Penilaian	Kesehatan
			Kesehatan (Unit	Koperasi
			Usaha)	Meliputi Tata
				Kelola, Profil
				Risiko, Kinerja
				Keuangan, dan
				Permodalan
	meningkatnya		Persentase	2.17.05 -
	kualitas SDM		Koperasi yang	PROGRAM
	perkoperasian		Diberikan	PENDIDIKAN

			Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	DAN LATIHAN PERKOPERASIA N
		Meningkatny a Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.000 1 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	meningkatnya produktivitas koperasi		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

	Meningkatny a Dokumen Pelaksanaan Pemberdaya an dan Perlindunga n Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah

			Kabupaten/Kota
		Jumlah Koperasi	2.17.06.2.01 -
		yang dipulihkan	Pemberdayaan dan
		usahanya (Unit Usaha)	Perlindungan
		Osanaj	
			Koperasi yang Keanggotaannya
			dalam Daerah
			Kabupaten/Kota
		Jumlah Unit	2.17.06.2.01 -
		Usaha yang	Pemberdayaan
		Produktif,	dan
		Bernilai Tambah,	Perlindungan
		Memiliki Akses	Koperasi yang
		Pasar, Akses	Keanggotaannya
		Pembiayaan,	dalam Daerah
		Penguatan	Kabupaten/Kota
		Kelembagaan,	
		Penataan	
		Manajemen,	
		Standarisasi,	
		dan	
		Restrukturisasi	
		Usaha (Unit	
		Usaĥa)	
		Koperasi dengan	2.17.06.2.01 -
		Keanggotaan	Pemberdayaan
		Daerah	dan
		Kabupaten/Kota	Perlindungan
		(Unit Usaha)	Koperasi yang
			Keanggotaannya
			dalam Daerah
			Kabupaten/Kota

	 	 	Pembinaan	2.17.06.2.01 -
			dan/atau	Pemberdayaan
			Pendampingan	dan
			yang	Perlindungan
			dilaksanakan	Koperasi yang
			(Kelompok	Keanggotaannya
			Masyarakat)	dalam Daerah
				Kabupaten/Kota
			Jumlah Keluarga	2.17.06.2.01.000
			yang Mengikuti	2 - Penumbuhan
			Penumbuhan	Kesadaran
			Kesadaran	Keluarga dalam
			Keluarga dalam	Peningkatan
			Peningkatan	Taraf Hidup
			Taraf Hidup	Keluarga Melalui
			Keluarga Melalui	Kehidupan
			Kehidupan	Berkoperasi dan
			Berkoperasi dan	Pengembangan
			Pengembangan	Ekonomi
			Ekonomi	Lainnya
			Lainnya	
			(Keluarga)	
			Pembinaan	2.17.06.2.01.000
			dan/atau	3 - Pembinaan
			Pendampingan	dan
			yang	Pendampingan
			dilaksanakan	Bagi Keluarga
			(Kelompok	dan Kelompok
			Masyarakat)	Masyarakat yang
				Akan
				Membentuk
				Koperasi Dalam
				Pengembangan
				Ekonomi
			Jumlah Koperasi	2.17.06.2.01.000
			yang Difasilitasi	4 - Fasilitasi
			Kemitraannya	Kemitraan

	(Unit Usaha)	Vananasi mana
	(Unit Usana)	Koperasi yang
		Keanggotaannya
		Daerah
		Kabupaten/Kota
	Jumlah Unit	2.17.06.2.01.000
	Usaha yang	5 - Peningkatan
	Produktif,	Produktivitas,
	Bernilai Tambah,	Nilai Tambah,
	Memiliki Akses	Akses Pasar,
	Pasar, Akses	Akses
	Pembiayaan,	Pembiayaan,
	Penguatan	Penguatan
	Kelembagaan,	Kelembagaan,
	Penataan	Penataan
	Manajemen,	Manajemen,
	Standarisasi,	Standarisasi,
	dan	dan
	Restrukturisasi	Restrukturisasi
	Usaha (Unit	Usaha
	Usaĥa)	
	Jumlah Koperasi	2.17.06.2.01.000
	yang dipulihkan	6 - Pemulihan
	usahanya (Unit	Usaha Koperasi
	Usaha)	yang
		Keanggotaannya
		Daerah
		Kabupaten/Kota
	Jumlah Koperasi	2.17.06.2.01.000
	yang Difasilitasi	7 - Fasilitasi
	Permodalannya	Akses
	(Unit Usaha)	Permodalan
	(1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Koperasi yang
		Keanggotaannya
		Daerah
		Kabupaten/Kota

		Jumlah Koperasi	2.17.06.2.01.000
		yang Difasilitasi	8 - Fasilitasi
		Pelaporannya	Pelaporan
		(Unit Usaha)	Koperasi yang
		,	Keanggotaannya
			Daerah
			Kabupaten/Kota
		Koperasi dengan	2.17.06.2.01.000
		Keanggotaan	9 -
		Daerah	Pemberdayaan
		Kabupaten/Kota	Koperasi dengan
		(Unit Usaha)	Keanggotaan
			Daerah
			Kabupaten/Kota

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG	INDIKATOR	BAS			T	ARGET DA	N PA	GU INDIKA	TIF T	AHUN			PERANG
URUSAN / PROGRAM /	OUTCOME / OUTPUT	ELI NE	2026	5	2027	7	2028	3	2029)	2030)	KAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	GOLLOI	TAH UN 202 4	TA RG ET	PAGU									
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 -				18.287. 410.000 ,00		18.787. 410.000 ,00		19.690. 549.935 ,00		19.890. 549.935 ,00		20.278. 330.782 ,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				00.000,		00.000,		00.000,		00.000,		00.000,	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66,9	66, 93	3.500.0 00.000, 00	66, 94	4.000.0 00.000, 00	66, 95	4.500.0 00.000, 00	66, 96	4.700.0 00.000, 00	66, 97	5.000.0 00.000, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi,

													Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000		130.000 .000,00		130.000		130.000		130.000	,
Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	130.000 .000,00									
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1		

		1	1		1		1	1	1	1	
Perubahan											
RKA-SKPD											
(Dokumen)											
Jumlah	1	1		1		1		1		1	
Dokumen											
RKA-SKPD											
dan Laporan											
Hasil											
Koordinasi											
Penyusunan											
Dokumen											
RKA-SKPD											
(Dokumen)											
Jumlah	1	1		1		1		1		1	
Laporan											
Capaian											
Kinerja dan											
Ikhtisar											
Realisasi											
Kinerja SKPD											
dan Laporan											
Hasil											
Koordinasi											
Penyusunan											
Laporan											
Capaian											
Kinerja dan											
Ikhtisar											
Realisasi											
Kinerja SKPD											
(Laporan)											
Jumlah	1	1		1		1		1		1	
Laporan											

_	1	1					1		ı	
	Evaluasi									
	Kinerja									
	Perangkat									
	Daerah									
	(Laporan)									
	Jumlah	1	1	1	1	1		1		
	Subtansi									
	Koordinasi									
	Peningkatan									
	Partisipasi									
	Masyarakat									
	dalam									
	Penyelenggara									
	an Urusan									
	Pemerintahan									
	Daerah yang									
	Diampu									
	(Substansi)									
	Jumlah	1	1	1	1	1		1		
	Dokumen									
	DPA-SKPD									
	dan Laporan									
	Hasil									
	Koordinasi									
	Penyusunan									
	Dokumen									
	DPA-SKPD									
	(Dokumen)									
	Jumlah	1	1	1	1	1		1		
	Dokumen	_	_	_	-	_		_		
	Hasil									
	Penyelenggara									
	an Walidata									
	lan wannara									

D 1.1.										l
Pendukung										
Statistik										
Sektoral										
Daerah										
(Dokumen)										
Jumlah	2	2		2	2	2		2		
Dokumen										
Perencanaan										
Perangkat										
Daerah										
(Dokumen)										
Jumlah	1	1		1	1	1		1		
Dokumen	1	1		1	•	1		1		
Perencanaan										
Urusan Selain										
Renstra PD										
dan Renja PD										
yang disusun										
(Dokumen)		_								
Jumlah Berita	1	1		1	1	1		1		
Acara Hasil										
Forum										
Perangkat										
Daerah										
Berdasarkan										
Bidang										
Urusan yang										
Diampu dalam										
Rangka										
Penyusunan										
Dokumen										
Perencanaan										
Perangkat										
i Cialignat			I				I		I	1

	Daerah (Berita												
	Acara)												
	Jumlah Berita	1	1		1		1		1		1		
	Acara Hasil												
	Sinkronisasi												
	dan Harmonisasi												
	Pusat dan												
	Daerah dalam												
	Rangka												
	Mendukung												
	Target												
	Pembangunan												
	Nasional												
	melalui												
	Koordinasi												
	Teknis												
	Pembangunan (Berita Acara)												
	Jumlah Data	1	1		1		1		1		1		
	Statistik	-	-		1		_		1		_		
	Sektoral												
	Daerah yang												
	Telah												
	Dikumpulkan												
	dan Diperiksa												
	Lingkup												
	Perangkat Daerah (Data)												
2.17.01.2.01.0	Daeran (Data)			10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
001 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000. 000,00									
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 003 - Koordinasi dan Penyusunan				10.000. 000,00									

Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000. 000,00									
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 005 -				10.000. 000,00									

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan													
DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000. 000,00									
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	1	10.000. 000,00									

Realisasi	Realisasi		1		1								
Kinerja SKPD	Kinerja SKPD												
dan Laporan	dan Laporan												
Hasil	Hasil												
Koordinasi	Koordinasi												
Penyusunan	Penyusunan												
Laporan	Laporan												
Capaian	Capaian												
Kinerja dan	Kinerja dan												
Ikhtisar	Ikhtisar												
Realisasi	Realisasi												
Kinerja SKPD	Kinerja SKPD												
	(Laporan)												
2.17.01.2.01.0				10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
007 - Evaluasi				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Kinerja						,		ĺ		ĺ		·	
Perangkat													
Daerah													
Terlaksananya	Jumlah	1	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
Evaluasi	Laporan	-	_	000,00	_	00,00	_	00,00	_	00,00	_	000,00	
Kinerja	Evaluasi			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Perangkat	Kinerja												
Daerah	Perangkat												
Dacraii	Daerah												
	(Laporan)												
2.17.01.2.01.0	(Lapurari)		 	10.000.	 	10.000.		10.000.		10.000.	 	10.000.	
008 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Penyelenggara an Walidata													
Pendukung													
Statistik													
Sektoral													
Daerah													

Terselenggara nya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.01.0 010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				10.000. 000,00									

Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan													
Perangkat													
Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000.	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.01.0				10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
011 - Penyusunan				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Dokumen													
Perencanaan													
Urusan Selain													

Renstra PD dan Renja PD													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00	1	10.000.	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.01.0 012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				10.000. 000,00									
Terkoordinasi kannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Daerah yang	1	1	10.000. 000,00									

	Diampu (Substansi)												
2.17.01.2.01.0 013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				10.000. 000,00		10.000.		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi	Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi	1	1	10.000. 000,00									

Teknis Pembangunan	Teknis Pembangunan (Berita Acara)												
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.170.0 00.000, 00		2.695.5 00.000, 00		3.151.0 00.000, 00		3.279.5 00.000, 00		3.505.0 00.000, 00	
Meningkatnya Pengadministr asian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	2.170.0 00.000, 00	12	2.695.5 00.000, 00	12	3.151.0 00.000, 00	12	3.279.5 00.000, 00	12	3.505.0 00.000, 00	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	1	1		1		1		1		1		

GIIDD		1		ı		ı	1		ı	I
SKPD										
(Dokumen)										
Jumlah	1	1	1		1		1	1		
Dokumen										
Pelaporan da	ın									
Analisis										
Prognosis										
Realisasi										
Anggaran										
(Dokumen)										
Jumlah	1	1	1		1		1	1		
Dokumen										
Penatausaha	a									
n da										
Pengujian/Ve										
ifikasi										
Keuangan										
SKPD										
(Dokumen)										
Jumlah	1	1	1		1		1	1		
Laporan			_		_					
Keuangan										
Akhir Tahu	ın									
SKPD da										
Laporan Has										
Koordinasi										
Penyusunan										
Laporan										
Keuangan										
Akhir Tahu	ın									
SKPD										
(Laporan)										

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)							1							
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.17.01.2.02.0 001		Jumlah	3	4		4		4		4		4		
Bulanan		Laporan												
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjiangan ASN (Orang/bulan) 2.17.01.2.02.0 001 - Penyediaan Penyediaa		Keuangan												
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjiangan ASN (Orang/bulan) 2.17.01.2.02.0 001 Penyediaan Penyediaan		Bulanan/												
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan)														
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw Ulanan/Semes teran SKPD (Laporan)		Semesteran												
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) 23 25 25 25 25 25 25		SKPD dan												
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) 23 25 25 25 25 25 25		Laporan												
Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.17.01.2.02.0 001 - Penyediaan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) 2.19.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.		Koordinasi												
Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.17.01.2.02.0 001 - Penyediaan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan) 2.19.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.		Penyusunan												
Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan)														
Bulanan/Triw ulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 23 25 25 25 25 25 25 25														
Ulanan/Semes teran SKPD (Laporan)														
teran SKPD (Laporan)														
Jumlah Orang yang 23 25 25 25 25 25 25 25														
yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		(Laporan)												
Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		Jumlah Orang	23	25		25		25		25		25		
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		yang												
Tunjangan ASN (Orang/bulan) 2.17.01.2.02.0 001 - Penyediaan Data and the second of t		Menerima Gaji												
ASN (Orang/bulan)		dan												
ASN (Orang/bulan)		Tunjangan												
2.17.01.2.02.0 2.000.0 2.525.5 2.981.0 3.109.5 3.335.0 001 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, Penyediaan 00 00 00 00 00														
2.17.01.2.02.0 2.000.0 2.525.5 2.981.0 3.109.5 3.335.0 001 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, Penyediaan 00 00 00 00 00 00		(Orang/bulan)												
001 - Penyediaan 00.000, 00 00.000, 00 00.000, 00 00.000, 00 00.000, 00 00.000, 00	2.17.01.2.02.0	, , ,			2.000.0		2.525.5		2.981.0		3.109.5		3.335.0	
Penyediaan 00 00 00 00 00 00 00 00														
. Gaji dan	Gaji dan													
Tunjangan														
ASN														
Tersedianya Jumlah Orang 23 25 2.000.0 25 2.525.5 25 2.981.0 25 3.109.5 25 3.335.0		Jumlah Orang	23	25	2.000.0	25	2.525.5	25	2.981.0	25	3.109.5	25	3.335.0	
Gaji dan yang 00.000, 00.000, 00.000, 00.000, 00.000,	Gaji dan													
Tunjangan Menerima Gaji 00 00 00 00 00														
ASN dan														

	Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
2.17.01.2.02.0 002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	
2.17.01.2.02.0 003 - Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD				10.000. 000,00									
Terlaksananya Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000.	

F	T		1	ı		1		1		1			
Keuangan	Keuangan												
SKPD	SKPD												
	(Dokumen)												
2.17.01.2.02.0	,			10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
004 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Koordinasi				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
dan													
Pelaksanaan													
Akuntansi													
SKPD													
	T 1 1	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	
Terlaksananya	Jumlah	1	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
Koordinasi	Dokumen			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
dan	Koordinasi												
Pelaksanaan	dan												
Akuntansi	Pelaksanaan												
SKPD	Akuntansi												
	SKPD												
	(Dokumen)												
2.17.01.2.02.0				10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
005 -				000,00		000,00		00,000		000,00		000,00	
Koordinasi				,		,		ĺ		,		,	
dan													
Penyusunan													
Laporan													
Keuangan													
Akhir Tahun													
SKPD													
Tersedianya	Jumlah	1	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
		1	1	000,00	1	000,00	1	000,00	1	000,00	1	000,00	
Laporan	Laporan			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Keuangan	Keuangan												
Akhir Tahun													
SKPD dan	SKPD dan												
Laporan Hasil	Laporan Hasil												

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
2.17.01.2.02.0 006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	(Laporan)			10.000.		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.02.0 007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				10.000. 000,00									

Semesteran													
SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	4	10.000. 000,00									
ulanan/Semes teran SKPD	Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD (Laporan)												
2.17.01.2.02.0 008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000.		20.000.		20.000. 000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	

	Anggaran (Dokumen)												
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Meningkatnya Penyelenggara an Pengadministr asian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	
	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	0	1		1		1		1		1		

Barang Milik Daerah SKPD							
(Laporan)			-	-		-	
Jumlah	0	1	1	1	1	1	
Rencana							
Kebutuhan							
Barang Milik Daerah SKPD							
(Dokumen)							
Jumlah	0	1	1	1	1	1	
Dokumen		1	-	_	1	_	
Pengamanan							
Barang Milik							
Daerah SKPD							
(Dokumen)							
Jumlah	1	1	1	1	1	1	
Dokumen							
Hasil							
Pemanfaatan							
Barang Milik							
Daerah SKPD							
(Dokumen)	1	1	1	1	1	1	
Jumlah	1	1	1	1	1	1	
Laporan Hasil Pembinaan,							
Pengawasan,							
dan							
Pengendalian							
Barang Milik							
Daerah pada							
SKPD							
(Laporan)							

2.17.01.2.03.0				20.000.		20.000.		20.000.		20.000.		20.000.	
001 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Penyusunan													
Perencanaan													
Kebutuhan													
Barang Milik													
Daerah SKPD													
Tersedianya	Jumlah	0	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	
Rencana	Rencana			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Kebutuhan	Kebutuhan												
Barang Milik	Barang Milik												
Daerah SKPD	Daerah SKPD												
	(Dokumen)												
2.17.01.2.03.0	,			20.000.		20.000.		20.000.		20.000.		20.000.	
002 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Pengamanan				ĺ		,		ĺ				,	
Barang Milik													
Daerah SKPD													
Terlaksananya	Jumlah	0	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	
Pengamanan	Dokumen			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Barang Milik				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Daerah SKPD	Barang Milik												
Bacrair oili B	Daerah SKPD												
	(Dokumen)												
2.17.01.2.03.0	(2 onamen)			20.000.		20.000.		20.000.		20.000.		20.000.	
003				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Koordinasi				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
dan Penilaian													
Barang Milik													
Daerah SKPD													
Tersedianya	Jumlah	0	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	1	20.000.	
Laporan Hasil			1	000,00	1	000,00	1	000,00	1	000,00	1	000,00	
Penilaian	Penilaian			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
reillialali	reilliaiaii										1		

Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												
2.17.01.2.03.0 004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	(Laporan)			10.000. 000,00									
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.03.0 005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				10.000. 000,00									

Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.03.0 006 - Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000. 000,00									
Terlaksananya Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	10.000.	1	10.000. 000,00	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
2.17.01.2.03.0 007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				10.000. 000,00									
Terlaksananya Pemanfaatan	Jumlah Dokumen	1	1	10.000. 000,00									

Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			20,000		20,000		20,000		20,000		30.000.	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				30.000. 000,00		30.000.		30.000. 000,00		30.000. 000,00		000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	1	30.000.	1	30.000.	1	30.000.	1	30.000.	1	30.000.	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		

2.17.01.2.04.0 001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000.		10.000. 000,00	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.04.0 004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.04.0 005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000. 000,00									
Terlaksananya Pengolahan,	Jumlah Laporan Hasil	0	1	10.000. 000,00									

Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)												
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	150.000 .000,00									
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan	1	2		2		2		2		2		

·								
Tugas	dan							
Fungsi	yang							
Mengik								
Pendid	ilzan							
	elatihan							
(Orang								
Jumlal	n Orang 0	10		10	10	10	10	
yang								
Mengik	tuti							
Sosiali	sasi							
Peratu								
Perund								
Undan	ang-							
(Orang)	-			_			
	n Orang 2	3		3	3	3	3	
yang								
Mengik	ruti							
Bimbin	gan							
Teknis								
Implem								
Peratu								
Perund								
Undan								
(Orang		1						
Jumlal		1		1	1	1	1	
Dokum	ien							
	aan dan							
Pengola								
Admini	strasi							
Kepega								
(Dolars	waiaii							
(Dokur	11011)	1	1	1	-	-	_	
Jumlal		1		1	1	1	1	
Dokum	ien							

Hasil Koordinasi dan	
dan	
Pelaksanaaan Pelaksanaa Pelaksanaaan Pelaksanaa Pelaksan	
Sistem	
Informasi	
Kepegawaian	
(Dokumen)	
2.17.01.2.05.0 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000.	
001 - 000,00 000,00 000,00 000,00	
Peningkatan Cos, co Co	
Sarana dan	
Prasarana	
Disiplin	
Pegawai Pegawai	
Peningkatan Sarana dan	
Sarana dan Prasarana	
Prasarana Disiplin	
Disiplin Pegawai (Unit)	
Pegawai Pegawai	
2.17.01.2.05.0 20.000. 20.000. 20.000. 20.000. 20.000.	
002 - 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00	
Pengadaan	
Pakaian Dinas	
beserta Atribut	
Kelengkapann	
lya line line line line line line line line	
Tersedianya Jumlah Paket 0 10 20.000. 10 20.000. 10 20.000. 10 20.000. 10 20.000.	
Pakaian Dinas Pakaian Dinas	
beserta Atribut beserta Atribut	
Kelengkapan	

	Kelengkapan (Paket)												
2.17.01.2.05.0 003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000. 000,00									
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00									
2.17.01.2.05.0 004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	

2.17.01.2.05.0				10.000.	1	10.000.		10.000.		10.000.	1	10.000.	
005 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Monitoring,				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Evaluasi, dan													
Penilaian													
Kinerja													
Pegawai	T 1 1	1	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	
Terlaksananya	Jumlah	1	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
Monitoring,	Dokumen			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Evaluasi, dan	Monitoring,												
Penilaian	Evaluasi, dan												
Kinerja	Penilaian												
Pegawai	Kinerja												
	Pegawai												
	(Dokumen)												
2.17.01.2.05.0				20.000.		20.000.		20.000.		20.000.		20.000.	
009 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Pendidikan													
dan Pelatihan													
Pegawai													
Berdasarkan													
Tugas dan													
Fungsi													
Terlaksananya	Jumlah	1	2	20.000.	2	20.000.	2	20.000.	2	20.000.	2	20.000.	
Pendidikan	Pegawai			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
dan Pelatihan	Berdasarkan												
Pegawai	Tugas dan												
Berdasarkan	Fungsi yang												
Tugas dan	Mengikuti												
Fungsi	Pendidikan												
	dan Pelatihan												
	(Orang)												

2.17.01.2.05.0 010 - Sosialisasi				20.000. 000,00									
Peraturan Perundang- Undangan													
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	10	20.000. 000,00	10	20.000. 000,00	10	20.000.	10	20.000.	10	20.000. 000,00	
2.17.01.2.05.0 011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50.000. 000,00									
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2	3	50.000. 000,00									

2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.000		230.000		230.000		230.000		230.000 .000,00	
Meningkatnya Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	230.000	12	230.000	12	230.000	12	230.000	12	230.000	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	20		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan	12	12		12		12		12		12		

Fasilitasi							
Kunjungan Tamu (Laporan)							
Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	12	12	12	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		12	12	12	12	12	
Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan (Paket)		5	5	5	5	5	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	12	12	12	12	
Jumlah Paket Komponen Instalasi	12	12	12	12	12	12	

	T: 4 '1 /D			1		1							
	Listrik/Penera												
	ngan												
	Bangunan												
	Kantor yang												
	Disediakan												
	(Paket)												
	Jumlah Paket	5	5		5		5		5		5		
	Peralatan dan		O										
	Perlengkapan												
	Kantor yang												
	Disediakan												
	(Paket)												
	Jumlah Paket	12	12		12		12		12		12		
	Peralatan												
	Rumah												
	Tangga yang												
	Disediakan												
	(Paket)												
2.17.01.2.06.0	(I akci)			10.000.		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
001 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Penyediaan													
Komponen													
Instalasi													
Listrik/Penera													
ngan													
Bangunan													
Kantor													
Tersedianya	Jumlah Paket	12	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	
		14	14		14		14		14		14		
Komponen	Komponen			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Instalasi	Instalasi												
Listrik/Penera	Listrik/Penera												
ngan	ngan												

Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
2.17.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000. 000,00									
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	10.000. 000,00									
2.17.01.2.06.0 003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000. 000,00		10.000.		10.000.		10.000.		10.000.	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	
2.17.01.2.06.0 004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000. 000,00									

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000. 000,00									
2.17.01.2.06.0 005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000. 000,00									
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000. 000,00									
2.17.01.2.06.0 006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000. 000,00									
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	12	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	

	Disediakan (Dokumen)												
2.17.01.2.06.0 007 - Penyediaan Bahan/Materi al				5.000.0 00,00									
Tersedianya Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan (Paket)	2	5	5.000.0 00,00									
2.17.01.2.06.0 008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000. 000,00									
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	50.000. 000,00									
2.17.01.2.06.0 009 - Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Terlaksananya Penyelenggara	Jumlah Laporan	12	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	

an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi												
	SKPD (Laporan)												
2.17.01.2.06.0 010 - Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.0 00,00									
Terlaksananya Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD		0	20	5.000.0 00,00	20	5.000.0	20	5.000.0	20	5.000.0	20	5.000.0 00,00	
2.17.01.2.06.0 011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000. 000,00									
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	1	1	10.000. 000,00									

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				370.000 .000,00		380.000		400.000		450.000 .000,00		500.000	
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	1	370.000	1	380.000	1	400.000	1	450.000	1	500.000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		

	1 -	T . T	T . T	- 1 1	 _	1 -	1
Jumlah Unit	0	1	1	1	1	1	
Kendaraan							
Perorangan							
Dinas atau							
Kendaraan							
Dinas Jabatan							
yang							
Disediakan							
(Unit)							
Jumlah Unit	0	1	1	1	1	1	
Sarana dan							
Prasarana							
Gedung							
Kantor atau							
Bangunan							
Lainnya yang							
Disediakan							
(Unit)							
Jumlah Unit	0	2	2	2	2	2	
Peralatan dan						~	
Mesin Lainnya							
yang							
Disediakan							
(Unit)							
Jumlah Unit	0	1	1	1	1	1	
Gedung	U	1	1	1	1	1	
Bangunan							
Lainnya yang							
Disediakan							
(Unit)							
Jumlah Paket	0	1	1	1	2	2	
Mebel yang							

	Disediakan (Unit)											
2.17.01.2.07.0 001 - Pengadaan			50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		100.000		100.000	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit (Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0 1	000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	100.000	1	100.000	
2.17.01.2.07.0 002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.		50.000. 000,00		50.000.		50.000. 000,00		100.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit (Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	0 1	50.000.	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000.	1	100.000	

	Disediakan (Unit)												
2.17.01.2.07.0 005 - Pengadaan Mebel	(Ozza)			20.000. 000,00		30.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000. 000,00	1	30.000. 000,00	1	50.000. 000,00	2	50.000. 000,00	2	50.000. 000,00	
2.17.01.2.07.0 006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	
2.17.01.2.07.0 009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000. 000,00									
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000.	1	50.000. 000,00	

	Disediakan (Unit)												
2.17.01.2.07.0	(Offic)			50.000.		50.000.		50.000.		50.000.		50.000.	
010 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Pengadaan Sarana dan													
Prasarana													
Gedung Kantor atau													
Bangunan Lainnya													
Tersedianya	Jumlah Unit	0	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	
Sarana dan		U	1	000,00	1	000,00	1	000,00	1	000,00	1	000,00	
Prasarana dan	Prasarana			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Gedung	Gedung												
Kantor atau	_												
Bangunan	Bangunan												
Lainnya	Lainnya yang												
Lammya	Disediakan												
	(Unit)												
2.17.01.2.07.0	(OTITE)			50.000.		50.000.		50.000.		50.000.		50.000.	
011 -				000,00		000,00		00,00		000,00		000,00	
Pengadaan													
Sarana dan													
Prasarana													
Pendukung													
Gedung													
Kantor atau													
Bangunan													
Lainnya													
Tersedianya	Jumlah Unit	0	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	
Sarana dan	Sarana dan			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Prasarana	Prasarana												

Pendukung	Pendukung												
Gedung	Gedung												
Kantor atau	Kantor atau												
Bangunan	Bangunan												
Lainnya	Lainnya yang												
	Disediakan												
	(Unit)												
2.17.01.2.08 -				188.000		203.500		219.000		234.500		250.000	
Penyediaan				.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
Jasa													
Penunjang													
Urusan													
Pemerintahan													
Daerah													
Meningkatnya	Jumlah	12	12	188.000	12	203.500	12	219.000	12	234.500	12	250.000	
Pengelolaan	Laporan			.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
dan	Penyediaan												
Pengorganisas	Jasa												
ian Jasa	Komunikasi,												
Penunjang	Sumber Daya												
Urusan	Air dan Listrik												
Pemerintahan	yang												
Daerah	Disediakan												
	(Laporan)												
	Jumlah	12	12		12		12		12		12		
	Laporan												
	Penyediaan												
	Jasa Peralatan												
	dan												
	Perlengkapan												
	Kantor yang												
	Disediakan												
	(Laporan)												

	Jumlah Laporan	12	12		12		12		12		12		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.17.01.2.08.0 001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.0 00,00		8.500.0 00,00		9.000.0 00,00		9.500.0 00,00		10.000. 000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.0 00,00	12	8.500.0 00,00	12	9.000.0 00,00	12	9.500.0 00,00	12	10.000. 000,00	
2.17.01.2.08.0 002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000. 000,00		60.000. 000,00		70.000. 000,00		80.000. 000,00		90.000. 000,00	

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000. 000,00	12	60.000. 000,00	12	70.000. 000,00	12	80.000. 000,00	12	90.000. 000,00	
2.17.01.2.08.0 003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000. 000,00		35.000. 000,00		40.000. 000,00		45.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.000. 000,00	12	35.000. 000,00	12	40.000. 000,00	12	45.000. 000,00	12	50.000. 000,00	
2.17.01.2.08.0 004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.000		81.000. 000,00		90.000. 000,00		96.000. 000,00		105.000	
Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	132.000 .000,00	1	81.000. 000,00	1	90.000. 000,00	1	96.000. 000,00	1	105.000 .000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		

						1				1			
	Jumlah	1	1		1		1		1		1		
	Kendaraan												
	Perorangan												
	Dinas atau												
	Kendaraan												
	Dinas Jabatan												
	yang												
	Dipelihara dan												
	dibayarkan												
	Pajaknya												
	(Unit)												
	Jumlah	0	1		1		1		1		1		
	Kendaraan												
	Dinas												
	Operasional												
	atau Lapangan												
	yang												
	Dipelihara dan												
	dibayarkan												
	Pajak dan												
	Perizinannya												
	(Unit)												
	Jumlah	0	1		1		1		1		1		
	Gedung		-		_		_		-				
	Kantor dan												
	Bangunan												
	Lainnya yang												
	Dipelihara/Dir												
	ehabilitasi												
0.17.01.0.00.0	(Unit)			45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
2.17.01.2.09.0				45.000.		45.000.		45.000.		45.000.		45.000.	
001 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Penyediaan													

Jasa													
Pemeliharaan,													
Biaya													
Pemeliharaan,													
dan Pajak													
Kendaraan													
Perorangan													
Dinas atau													
Kendaraan													
Dinas Jabatan													
Tersedianya	Jumlah	1	1	45.000.	1	45.000.	1	45.000.	1	45.000.	1	45.000.	
Jasa	Kendaraan			000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Pemeliharaan,	Perorangan			,		,		,				·	
Biaya	Dinas atau												
Pemeliharaan	Kendaraan												
dan Pajak	Dinas Jabatan												
Kendaraan	yang												
Perorangan	Dipelihara dan												
Dinas atau													
Kendaraan	Pajaknya												
Dinas Jabatan	(Unit)												
2.17.01.2.09.0				10.000.		12.000.		15.000.		17.000.		20.000.	
002 -				000,00		000,00		000,00		000,00		000,00	
Penyediaan													
Jasa													
Pemeliharaan,													
Biaya													
Pemeliharaan,													
Pajak dan													
Perizinan													
Kendaraan													
Dinas													

Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	10.000.	1	12.000. 000,00	1	15.000. 000,00	1	17.000. 000,00	1	20.000. 000,00	
2.17.01.2.09.0 006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	,			10.000. 000,00		12.000. 000,00		15.000. 000,00		17.000. 000,00		20.000. 000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10.000. 000,00	10	12.000. 000,00	10	15.000. 000,00	10	17.000. 000,00	10	20.000. 000,00	
2.17.01.2.09.0 009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.		12.000.		15.000. 000,00		17.000.		20.000.	

Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	10.000. 000,00	1	12.000. 000,00	1	15.000. 000,00	1	17.000. 000,00	1	20.000. 000,00	
2.17.01.2.09.0 010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.000. 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	57.000. 000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA				351.384 .000,00		351.384		365.439 .360,00		365.439 .360,00		365.439 .360,00	

SIMPAN PINJAM													
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	10	15	351.384 .000,00	15	351.384 .000,00	15	365.439 .360,00	15	365.439 .360,00	15	365.439 .360,00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta				175.692 .000,00		175.692 .000,00		182.719 .680,00		182.719 .680,00		182.719 .680,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	0	5	175.692 .000,00	5	175.692 .000,00	5	182.719 .680,00	7	182.719 .680,00	7	182.719 .680,00	

T	1	ı				1		1		
Keanggotaan	Koperasi									
dalam Daerah	Simpan									
	Pinjam untuk									
	Koperasi									
	dengan									
	Wilayah									
	Keanggotaan									
	dalam Daerah									
	Kabupaten/Ko									
	ta (Unit Usaha)									
2.17.02.2.01.0			175.692	175.692	182.719		182.719		182.719	
001 - Fasilitasi			.000,00	.000,00	.680,00		.680,00		.680,00	
Pemenuhan										
Izin Usaha										
Simpan										
Pinjam dan										
Pembukaan										
Kantor										
Cabang,										
Cabang										
Pembantu dan										
Kantor Kas										
Koperasi										
Simpan										
Pinjam untuk										
Koperasi										
dengan										
Wilayah										
Keanggotaan										
dalam Daerah										
Kabupaten/Ko										
ta										

Terfasilitasiny	Jumlah Usaha	0	5	175.692	5	175.692	5	182.719	7	182.719	7	182.719	
a Pemenuhan	Simpan			.000,00	J	.000,00	O	.680,00	l *	.680,00	l *	.680,00	
Usaha Simpan				.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
Pinjam dan													
Pembukaan	Kantor												
Kantor	Cabang,												
Cabang,	Cabang												
Cabang, Cabang	Pembantu dan												
Pembantu dan	Kantor Kas												
Kantor Kas	Koperasi												
Koperasi	Simpan												
Simpan	Pinjam untuk												
Pinjam untuk													
Koperasi	dengan												
dengan	Wilayah												
Wilayah	Keanggotaan												
Keanggotaan	dalam Daerah												
dalam Daerah													
Kabupaten/Ko	ta (Unit Usaha)												
ta													
2.17.02.2.02 -				175.692		175.692		182.719		182.719		182.719	
Penerbitan				.000,00		.000,00		.680,00		.680,00		.680,00	
Izin				,,,,,,		,,,,,,		,,,,,,		,,,,,,		,,,,,,	
Pembukaan													
Kantor													
Cabang,													
Cabang													
Pembantu dan													
Kantor Kas													
Koperasi													
Simpan													
Pinjam untuk													
Koperasi													

dengan Wilayah													
Keanggotaan													
dalam Daerah													
Kabupaten/Ko													
ta													
Meningkatnya	Jumlah	0	2	175.692	2	175.692	2	182.719	2	182.719	2	182.719	
Pelaksanaan	Kantor			.000,00		.000,00		.680,00		.680,00		.680,00	
Penerbitan	Cabang,												
Izin	Cabang												
Pembukaan	Pembantu dan												
Kantor	Kantor Kas												
Cabang,	Koperasi												
Cabang	Simpan												
Pembantu dan	Pinjam untuk												
Kantor Kas	Koperasi												
Koperasi	dengan												
Simpan	Wilayah												
Pinjam untuk	Keanggotaan												
Koperasi	dalam Daerah												
dengan	Kabupaten/Ko												
Wilayah	ta (Unit Usaha)												
Keanggotaan													
dalam Daerah													
2.17.02.2.02.0				175.692		175.692		182.719		182.719		182.719	
001 - Fasilitasi				.000,00		.000,00		.680,00		.680,00		.680,00	
Pemenuhan													
Izin Usaha													
Pembukaan													
Kantor													
Cabang,													
Cabang													
Pembantu dan													

Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko													
Terfasilitasiny a Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko	0	2	175.692 .000,00	2	175.692 .000,00	2	182.719 .680,00	2	182.719 .680,00	2	182.719 .680,00	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN				6.515.2 45.000, 00		6.515.2 45.000, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00	

PEMERIKSAA N KOPERASI													
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	52	65	6.515.2 45.000, 00	67	6.515.2 45.000, 00	71	6.775.8 54.800, 00	73	6.775.8 54.800, 00	75	6.775.8 54.800, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				6.515.2 45.000, 00		6.515.2 45.000, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00	
Meningkatnya Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan	0	245	6.515.2 45.000, 00	250	6.515.2 45.000, 00	255	6.775.8 54.800, 00	260	6.775.8 54.800, 00	260	6.775.8 54.800, 00	

dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah	Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)												
Daeran	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	245		250		255		260		260		
2.17.03.2.01.0 003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				3.257.6 22.500, 00		3.257.6 22.500, 00		3.387.9 27.400, 00		3.387.9 27.400, 00		3.387.9 27.400, 00	
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	0	245	3.257.6 22.500, 00	250	3.257.6 22.500, 00	255	3.387.9 27.400, 00	260	3.387.9 27.400, 00	260	3.387.9 27.400, 00	

	Koperasi (Unit Usaha)												
2.17.03.2.01.0 004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/Ko				3.257.6 22.500, 00		3.257.6 22.500, 00		3.387.9 27.400, 00		3.387.9 27.400, 00		3.387.9 27.400, 00	
ta Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	245	3.257.6 22.500, 00	250	3.257.6 22.500, 00	255	3.387.9 27.400, 00	260	3.387.9 27.400, 00	260	3.387.9 27.400, 00	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				1.266.4 46.500, 00		1.266.4 46.500, 00		1.317.1 04.360, 00		1.317.1 04.360, 00		1.317.1 04.360, 00	

meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	72	75	1.266.4 46.500, 00	75	1.266.4 46.500, 00	78	1.317.1 04.360, 00	78	1.317.1 04.360, 00	80	1.317.1 04.360, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaany a dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta				1.266.4 46.500, 00		1.266.4 46.500, 00		1.317.1 04.360, 00		1.317.1 04.360, 00		1.317.1 04.360, 00	
Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88	1.266.4 46.500, 00	93	1.266.4 46.500, 00	98	1.317.1 04.360, 00	100	1.317.1 04.360, 00	100	1.317.1 04.360, 00	

Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaany a dalam 1 (Satu) Daerah													
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88		93		98		100		100		
2.17.04.2.01.0 001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko				633.223 .250,00		633.223 .250,00		658.552 .180,00		658.552 .180,00		658.552 .180,00	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88	633.223 .250,00	93	633.223 .250,00	98	658.552 .180,00	100	658.552 .180,00	100	658.552 .180,00	

2.17.04.2.01.0 003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				633.223 .250,00		633.223 .250,00		658.552 .180,00		658.552 .180,00		658.552 .180,00	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kesehatan	0	88	633.223	93	633.223 .250,00	98	658.552 .180,00	100	658.552	100	658.552 .180,00	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS IAN				878.460 .000,00		878.460 .000,00		896.029 .200,00		896.029 .200,00		922.910 .076,00	
meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	58	60	878.460 .000,00	62	878.460 .000,00	62	896.029 .200,00	65	896.029 .200,00	68	922.910 .076,00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga

													h Kota Binjai
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta				878.460 .000,00		878.460 .000,00		896.029 .200,00		896.029 .200,00		922.910 .076,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Perkoperasian (Orang)	0	50	878.460 .000,00	50	878.460 .000,00	50	896.029 .200,00	50	896.029 .200,00	50	922.910 .076,00	
2.17.05.2.01.0 001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				878.460 .000,00		878.460 .000,00		896.029 .200,00		896.029 .200,00		922.910 .076,00	

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	50	878.460 .000,00	50	878.460 .000,00	50	896.029 .200,00	50	896.029 .200,00	50	922.910 .076,00	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI				248.897 .000,00		248.897 .000,00		253.874 .940,00		253.874 .940,00		258.952 .439,00	
meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	69	72	248.897	72	248.897 .000,00	73	253.874 .940,00	75	253.874 .940,00	75	258.952 .439,00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah				248.897 .000,00		248.897 .000,00		253.874 .940,00		253.874 .940,00		258.952 .439,00	

Kabupaten/Ko ta													
Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Ko ta (Unit Usaha)	5	10	248.897 .000,00	10	248.897 .000,00	10	253.874 .940,00	10	253.874 .940,00	10	258.952 .439,00	
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	1	2		2		2		2		2		

Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisas i Usaha (Unit							
Usaha)							
Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	0	2	2	2	2	2	
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalanny a (Unit Usaha)	0	2	2	2	2	2	
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	5	5	5	5	5	
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2	5	5	5	5	5	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	0	10	10	10	10	10	

	Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga												
	n Ekonomi												
	Lainnya												
	(Keluarga)												
2.17.06.2.01.0				21.271.		21.271.		21.982.		21.982.		22.707.	
002 -				000,00		000,00		136,00		136,00		493,00	
Penumbuhan													
Kesadaran													
Keluarga													
dalam Peningkatan													
Taraf Hidup													
Keluarga													
Melalui													
Kehidupan													
Berkoperasi													
dan													
Pengembanga													
n Ekonomi													
Lainnya													
Terlaksananya	Jumlah	0	10	21.271.	10	21.271.	10	21.982.	10	21.982.	10	22.707.	
Penumbuhan	Keluarga yang			000,00		000,00		136,00		136,00		493,00	
Kesadaran	Mengikuti												
Keluarga	Penumbuhan												
dalam	Kesadaran												
Peningkatan	Keluarga												

Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya	dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi												
	Lainnya												
	(Keluarga)												
2.17.06.2.01.0 003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembanga n Ekonomi				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	

	T	1				I	ı	I		1	1		
Peningkatan													
Taraf Hidup													
Melalui													
Kehidupan													
Berkoperasi													
Dalam													
Pengembanga													
n Ekonomi													
2.17.06.2.01.0				21.271.		21.271.		21.982.		21.982.		22.707.	
004 - Fasilitasi				000,00		000,00		134,00		134,00		491,00	
Kemitraan								,				,,,,,	
Koperasi yang													
Keanggotaann													
ya Daerah													
Kabupaten/Ko													
ta													
ta Fasilitasi	Jumlah	2	5	21 271	5	21 271	5	21 982	5	21 982	5	22 707	
Fasilitasi	Jumlah Koperasi yang	2	5	21.271.	5	21.271.	5	21.982.	5	21.982.	5	22.707. 491.00	
Fasilitasi kemitraan	Koperasi yang	2	5	21.271. 000,00	5	21.271. 000,00	5	21.982. 134,00	5	21.982. 134,00	5	22.707. 491,00	
Fasilitasi kemitraan antar koperasi	Koperasi yang Difasilitasi	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara	Koperasi yang Difasilitasi	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaann	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaann ya Daerah	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaann	Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	5		5		5		5		5		

2.17.06.2.01.0				21.271.		21.271.		21.982.		21.982.		22.707.	
005 -				000,00		000,00		134,00		134,00		491,00	
Peningkatan				,		ŕ		,		,		,	
Produktivitas,													
Nilai Tambah,													
Akses Pasar,													
Akses													
Pembiayaan,													
Penguatan													
Kelembagaan,													
Penataan													
Manajemen,													
Standarisasi,													
dan													
Restrukturisas													
i Usaha													
Meningkatnya	Jumlah Unit	1	2	21.271.	2	21.271.	2	21.982.	2	21.982.	2	22.707.	
Produktivitas,	Usaha yang			000,00		000,00		134,00		134,00		491,00	
Nilai Tambah,	Produktif,												
Akses Pasar,	Bernilai												
Akses	Tambah,												
Pembiayaan,	Memiliki Akses												
Penguatan	Pasar, Akses												
Kelembagaan,	Pembiayaan,												
Penataan	Penguatan												
Manajemen,	Kelembagaan,												
Standarisasi,	Penataan												
dan	Manajemen,												
Restrukturisas	Standarisasi,												
i Usaha	dan												
	Restrukturisas												
	i Usaha (Unit												
	Usaha)												

2.17.06.2.01.0 006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/Ko ta				21.271. 000,00		21.271. 000,00		21.982. 134,00		21.982. 134,00		22.707. 491,00	
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Ko ta dalam kondisi darurat melalui restrukturisas i kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	0	2	21.271.	2	21.271.	2	21.982. 134,00	2	21.982. 134,00	2	22.707. 491,00	
2.17.06.2.01.0 007 - Fasilitasi Akses Permodalan				21.271. 000,00		21.271. 000,00		21.982. 134,00		21.982. 134,00		22.707. 491,00	

Koperasi yang Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/Ko ta													
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalanny a (Unit Usaha)	0	2	21.271. 000,00	2	21.271. 000,00	2	21.982. 134,00	2	21.982. 134,00	2	22.707. 491,00	
2.17.06.2.01.0 008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/Ko				21.271. 000,00		21.271. 000,00		21.982. 134,00		21.982. 134,00		22.707. 491,00	
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaann ya Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	5	21.271. 000,00	5	21.271. 000,00	5	21.982. 134,00	5	21.982. 134,00	5	22.707. 491,00	

							1	1	1			
2.17.06.2.01.0			21.271.		21.271.		21.982.		21.982.		22.707.	
009 -			000,00		000,00		134,00		134,00		491,00	
Pemberdayaan												
Koperasi												
dengan												
Keanggotaan												
Daerah												
Kabupaten/Ko												
ta												
	perasi 5	10	21.271.	10	21.271.	10	21.982.	10	21.982.	10	22.707.	
iklim usaha den	ngan		000,00		00,00	_	134,00		134,00		491,00	
	anggotaan		ĺ		,		,		,		,	
	erah											
	bupaten/Ko											
	(Unit Usaha)											
pemasaran,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											
keuangan, dan												
inovasi												
teknologi bagi												
Koperasi												
dengan												
Keanggotaan												
Daerah												
Kabupaten/Ko												
ta												
2.17.07 -			3.857.9		3.857.9		3.896.4		3.896.4		3.935.4	
PROGRAM			03.500,		03.500,		82.535,		82.535,		47.360,	
PEMBERDAYA			00		00.000,		00		00		00	
AN USAHA												
MENENGAH,												
USAHA KECIL,												
DAN USAHA												

MIKRO (UMKM)													
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,17	0,1	3.857.9 03.500, 00	0,2	3.857.9 03.500, 00	0,2	3.896.4 82.535, 00	0,2	3.896.4 82.535, 00	0,2	3.935.4 47.360, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransforma si dari Informal ke Formal (Persentase)	0,01	0,0 21		0,0 26		0,0 31		0,0 36		0,0 41		
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan				3.857.9 03.500, 00		3.857.9 03.500, 00		3.896.4 82.535, 00		3.896.4 82.535, 00		3.935.4 47.360, 00	

Koordinasi													
dengan Para													
Pemangku													
Kepentingan													
Jumlah	Jumlah Usaha	0	100	3.857.9	100	3.857.9	100	3.896.4	100	3.896.4	100	3.935.4	
Penyelenggara	Mikro yang		100	03.500,	100	03.500,	100	82.535,	100	82.535,	100	47.360,	
n	Telah			00.500,		00.500,		00		00		00	
Pemberdayaan	Mendapatkan			00		00		00		00		00	
Usaha Mikro	Perizinan (Unit												
	Usaha)												
yang Dilakukan	Usana)												
Melalui													
Pendataan,													
Kemitraan, Kemudahan													
Perizinan,													
Penguatan													
Kelembagaan													
dan													
Koordinasi													
dengan Para													
Pemangku													
Kepentingan													
	Jumlah Usaha	0	500		500		550		550		600		
	Mikro yang												
	Terfasilitasi												
	(Unit Usaha)												
	Jumlah Usaha	0	10		10		10		10		10		
	Mikro yang												
	terfasilitasi												
	(Unit Usaha)												
	Jumlah SDM	0	10		10		10		10		10		
	yang												

Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaa n (Orang)						
Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)		50	50	50	50	
Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)		50	50	50	50	
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)					600	
Jumlah Unit Usaha yang Telah	500	500	550	550	600	

	Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)												
2.17.07.2.01.0 002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				500.000		500.000		510.000 .000,00		510.000 .000,00		520.000 .000,00	
Terfasilitasiny a Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	500	500.000	500	500.000	550	510.000	550	510.000	600	520.000 .000,00	
2.17.07.2.01.0 003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
Terfasilitasiny a Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	
2.17.07.2.01.0 004 -				700.000		700.000		710.000		710.000		720.000 .000,00	

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro													
Terfasilitasiny a Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		500	700.000 .000,00	500	700.000 .000,00	550	710.000 .000,00	550	710.000 .000,00	600	720.000 .000,00	
2.17.07.2.01.0 005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				200.000		200.000		300.000		300.000		310.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	0	50	200.000	50	200.000	50	300.000 .000,00	50	300.000	50	310.000 .000,00	

dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)												
2.17.07.2.01.0 007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/P encatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
Terfasilitasiny a Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/P encatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasi	0	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	

2.17.07.2.01.0 008 - Pemulihan Usaha Mikro				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
Terfasilitasiny a Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisas i kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Terfasilitasi	0	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	
2.17.07.2.01.0 009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
Terfasilitasiny a Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	
2.17.07.2.01.0 010 - Pendampingan dan Bantuan				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	

Hukum bagi													
Usaha Mikro													
Terfasilitasiny	Jumlah Usaha	0	20	300.000	20	300.000	20	300.000	20	300.000	20	300.000	
a	Mikro yang			.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
Pendampingan	Terfasilitasi												
dan Bantuan	(Unit Usaha)												
Hukum bagi													
Usaha Mikro													
2.17.07.2.01.0				200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
011 - Fasilitasi				.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
Sertifikasi dan													
Standardisasi													
Usaha Mikro													
Terfasilitasiny	Jumlah Usaha	0	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	
a Sertifikasi	Mikro yang			.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
dan	Terfasilitasi												
Standardisasi	(Unit Usaha)												
Usaha Mikro													
2.17.07.2.01.0				307.903		307.903		206.482		206.482		200.000	
012 - Fasilitasi				.500,00		.500,00		.535,00		.535,00		.000,00	
Pengadaan													
Barang/Jasa													
Pemerintah													
Terfasilitasiny	Jumlah Usaha	0	1	307.903	1	307.903	1	206.482	1	206.482	1	200.000	
a Usaha Mikro	Mikro yang			.500,00		.500,00		.535,00		.535,00		.000,00	
dalam proses	Terfasilitasi												
Pengadaan	(Unit Usaha)												
Barang/Jasa													
Pemerintah													
2.17.07.2.01.0				250.000		250.000		270.000		270.000		300.000	
013 -				.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
Penyediaan													
Tempat													

					1					1			
Promosi dan													
Pengembanga													
n Usaha Kecil													
pada													
Infrastruktur													
Publik													
Terfasilitasiny	Jumlah Usaha	0	500	250.000	500	250.000	550	270.000	550	270.000	600	300.000	
a Penyediaan	Mikro yang			.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.000,00	
Tempat	Terfasilitasi			Ź		,		,		ĺ		ŕ	
Promosi dan	(Unit Usaha)												
Pengembanga	,												
n Usaha Mikro													
pada													
Infrastruktur													
Publik													
meliputi													
terminal,													
bandar udara,													
pelabuhan,													
stasiun,													
tempat													
peristirahatan													
dan pelayanan													
jalan tol,													
dan/atau													
infrastruktur													
publik lain													
2.17.07.2.01.0				300.000		300.000		300.000		300.000		285.447	
014 -				.000,00		.000,00		.000,00		.000,00		.360,00	
Penyusunan				,		,		,					
Basis Data													
Usaha Mikro													

Terfasilitasiny a Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		0 50	300.000	50	300.000	50	300.000	50	300.000	50	285.447 .360,00	
2.17.07.2.01.0 015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaa n melalui Pendidikan dan Pelatihan			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaa n	dan Kewirausahaa	0 10	.000,00	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	
2.17.08 - PROGRAM			1.669.0 74.000, 00		1.669.0 74.000, 00		1.685.7 64.740, 00		1.685.7 64.740, 00		1.702.6 22.387, 00	

PENGEMBAN													
GAN UMKM													
meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,01	0,0 26	1.669.0 74.000, 00	0,0	1.669.0 74.000, 00	0,0 36	1.685.7 64.740, 00	0,0	1.685.7 64.740, 00	0,0	1.702.6 22.387, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.08.2.01 - Pengembanga n Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.669.0 74.000, 00		1.669.0 74.000, 00		1.685.7 64.740, 00		1.685.7 64.740, 00		1.702.6 22.387, 00	
Meningkatnya Kegiatan Pengembanga n Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	15	1.669.0 74.000, 00	15	1.669.0 74.000, 00	15	1.685.7 64.740, 00	15	1.685.7 64.740, 00	15	1.702.6 22.387, 00	

	T			1									
	Jumlah Unit	3	100		100		100		150		150		
	Usaha UMKM												
	yang												
	Mendapatkan												
	Fasilitas												
	Produksi dan												
	Pengolahan,												
	Pemasaran,												
	Sumber Daya												
	Manusia,												
	Serta Desain												
	dan Teknologi												
	(Unit Usaha)	0	100		100		100		150		150		
	Jumlah Usaha	0	100		100		100		150		150		
	Mikro yang												
	Terfasilitasi												
	(Unit Usaha)												
2.17.08.2.01.0				769.074		769.074		785.764		785.764		702.622	
002 -				.000,00		.000,00		.740,00		.740,00		.387,00	
Pengembanga													
n Usaha Mikro													
Terfasilitasiny	Jumlah Usaha	0	100	769.074	100	769.074	100	785.764	150	785.764	150	702.622	
a Usaha Mikro	Mikro yang			.000,00		.000,00		.740,00		.740,00		.387,00	
Menjadi Usaha				,		,		,		Ź		ŕ	
Menengah	(Unit Usaha)												
Melalui													
Pendampingan													
, Kemitraan,													
Perluasan													
Pasar, Akses													
Pembiayaan													
dan Investasi,													
Pengembanga													

n SDM, dan/Kegiatan Lainnya													
2.17.08.2.01.0 004 - Fasilitasi Pengembanga n Inkubasi Secara				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
Terpadu dan Berjenjang													
Terlaksananya Pengembanga n Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang	Terfasilitasi	0	15	300.000	15	300.000	15	300.000	15	300.000	15	300.000	
2.17.08.2.01.0 006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				600.000		600.000		600.000		600.000		700.000	
Terfasilitasiny a Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,	3	100	600.000	100	600.000	100	600.000	150	600.000	150	700.000	

Serta Desain	Pemasaran,						
dan Teknologi	Sumber Daya						
	Manusia,						
	Serta Desain						
	dan Teknologi						
	(Unit Usaha)						

4.2. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Seiring RPJMD maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kinerjanya.

Beberapa penjelasan indikator pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA RPJMD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2029

NO	INDIII A MOD	O A MIT A 31	BASELINE		,	TARGET	` TAHUN	Ţ		TARRED AND AN
NO	INDIKATOR	SATUAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I			ASP	EK DAY	A SAIN	G DAER	AH			
1	Rasio Volume	%	0	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79	
	Usaha									
	Koperasi									
	terhadap PDRB									
	(%)									
2	Proporsi	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	
	Jumlah UKM									
	non Pertanian									
	(%)	0/	0.17	0.10	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00	
3	Rasio	%	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	
	Kewirausahaan									
4	Daerah (%) Jumlah Pelaku	Pelaku	0	1	2	3	5	7	9	
7	Usaha	Usaha	U	1	4	3	3	1	9	
	Ekonomi	Usana								
	Kreatif yang									
	memiliki HAKI									
5	Proporsi	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	
	Jumlah Usaha	, 0					11,01	,	11,01	
	Kecil dan									

	Menengah (UKM) Non									
	Pertanian									
II			IND	IKATOF	KINER	JA KUN	CI			
1	Kontribusi	Persentase	0	10	11	12	14	17	20	
	UMKM									
	terhadap PDRB									
2	Proporsi PDRB	%	0	6	8	10	12	14	16	
	Ekonomi									
	Kreatif (%)									
3	Proporsi	Angka	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90	
	Jumlah Usaha									
	Kecil dan									
	Menengah									

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE			TARGE'	r tahun		
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	0	10	11	12	14	17	20
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79
3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	0	6	8	10	12	14	16
4.	Proporsi Jumlah UKM non Pertanian (%)	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34
5.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Angka	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90
6.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
7.	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku Usaha	0	1	2	3	5	7	9
8.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34

Menengah (UKM) Non				
Pertanian				

Tabel 4.7
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE	TARGE	T TAHUN	1			
				TAHUN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				2024						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kontribusi	positif	Persentase	0	10	11	12	14	17	20
	UMKM terhadap									
	PDRB									
2.	Proporsi PDRB		%	0	6	8	10	12	14	16
	Ekonomi Kreatif									
	(%)									
3.	Proporsi Jumlah	komulatif	Angka	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90
	Usaha Kecil dan									
	Menengah									

4.	Persentase	positif	Persentase	52	60	65	67	71	73	75
	Pengawasan dan									
	Pemeriksaan									
	Koperasi									
5.	Pertumbuhan	positif	Persentase	10	15	15	15	15	15	15
	Volume Usaha									
	Koperasi									

Tabel 4.8

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.17.02 - PROGRAM	Meningkatnya kualitas layanan	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha
	PELAYANAN IZIN USAHA	izin usaha simpan pinjam	Simpan Pinjam untuk Koperasi
	SIMPAN PINJAM		dengan Wilayah Keanggotaan dalam
			Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi
			Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam
			dan Pembukaan Kantor Cabang,
			Cabang Pembantu dan Kantor Kas
			Koperasi Simpan Pinjam untuk
			Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
			dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	2.17.03 - PROGRAM	meningkatnya pembinaan dan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan
	PENGAWASAN DAN	pengawasan koperasi	Pengawasan Koperasi, Koperasi
	PEMERIKSAAN KOPERASI		Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
			Koperasi yang Wilayah
			Keanggotaannya dalam Daerah
			Kabupaten/ Kota
			2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata
			Kelola Kelembagaan Koperasi

			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan
			Proses Pemeriksaan dan Pengawasan
			Koperasi yang Wilayah
			Keanggotaannya Daerah
			Kabupaten/Kota
3.	2.17.04 - PROGRAM	meningkatnya kinerja	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan
	PENILAIAN KESEHATAN	pengelolaan koperasi	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
	KSP/USP KOPERASI		Pinjam Koperasi yang Wilayah
	·		Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
			Kabupaten/Kota
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan
			Penilaian Kesehatan KSP/USP
			Koperasi Kewenangan
			Kabupaten/Kota
			2.17.04.2.01.0003 - Penilaian
			Kesehatan Koperasi Meliputi Tata
			Kelola, Profil Risiko, Kinerja
			Keuangan, dan Permodalan
4.	2.17.05 - PROGRAM	meningkatnya kualitas SDM	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan
	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	perkoperasian	Perkoperasian Bagi Koperasi yang
	PERKOPERASIAN		Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
			Kabupaten/Kota
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan
			Pemahaman dan Pengetahuan
			Perkoperasian serta Kapasitas dan
			Kompetensi SDM Koperasi

5.	2.17.06 - PROGRAM	meningkatnya produktivitas	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan
	PEMBERDAYAAN DAN	koperasi	Perlindungan Koperasi yang
	PERLINDUNGAN KOPERASI		Keanggotaannya dalam Daerah
			Kabupaten/Kota
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan
			Pendampingan Bagi Keluarga dan
			Kelompok Masyarakat yang Akan
			Membentuk Koperasi Dalam
			Pengembangan Ekonomi
6.	2.17.07 - PROGRAM	Meningkatnya kapasitas UMKM	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha
	PEMBERDAYAAN USAHA	yang tangguh dan mandiri	Mikro yang Dilakukan Melalui
	MENENGAH, USAHA KECIL,		Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
	DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Perizinan, Penguatan Kelembagaan
			dan Koordinasi dengan Para
			Pemangku Kepentingan
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan
			Melalui Kemitraan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan
			Kelembagaan Potensi dan
			Pengembangan Usaha Mikro
7.	2.17.08 - PROGRAM	meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha
	PENGEMBANGAN UMKM		Mikro dengan Orientasi Peningkatan
			Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan
			Usaha Mikro

	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan
	Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya
	Manusia, serta Desain dan Teknologi

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra yang telah disusun memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenengah Provinsi Kalimantan Barat.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai tahun 2025-2029 selain merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan tiga tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, dokumen Renstra yang telah tersusun diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, baik intern organisasi maupun di lingkup provinsi.

Menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan di pusat dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja selama lima tahun pelaksanaan RPJMD/Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai melakukan revisi yang mendasar terkait program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator dan target.

Dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2025 – 2029 dan berlaku di tahun 2025 ini program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai target yang direncanakan sehingga pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kota Binjai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai,

NIP.....